



Pemerintah
Kota Blitar

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN II TAHUN 2016-2021

Sekretariat Daerah Kota Blitar

JL. MERDEKA 105 BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya **"RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN II SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 2016-2021"** sehingga dokumen ini dapat tersusun dan terselesaikan, dimana dokumen ini merupakan upaya Sekretariat Daerah dalam mengimbangi perubahan dan dinamika masyarakat, perubahan kebijakan regulasi Pemerintah Pusat serta tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Pemerintah Kota Blitar beserta OPD-nya.

Renstra P-II ini merupakan rumusan, Sekretariat Daerah sebagai OPD Pemerintah Kota Blitar, untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, menentukan taktik dan strategi, menetapkan program / kegiatan prioritas, bagaimana cara melaksanakan dan mencapai hasil dimaksud dengan didukung kemampuan daerah serta sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien.

Keberhasilan dalam implementasi dan pelaksanaan Renstra P-II Sekretariat Daerah Kota Blitar sesuai tugas pokok dan fungsi ini sangat memerlukan dukungan, komitmen pimpinan, pegawai sekretariat daerah, seluruh elemen Pemerintah dan masyarakat Kota Blitar. Disamping itu perencanaan strategis yang tersusun dalam RENSTRA P-II bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika yang ada serta menjadi ajang komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya dokumen Renstra P-II ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kinerja (*performance plan*), penyusunan rencana kerja dan anggaran (*operational plan*), pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Sekretariat Daerah dan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah.

Akhirnya atas masukan, sumbangan saran dan pemikiran dari semua pihak sehingga Renstra P-II Sekretariat Daerah Kota Blitar 2016-2021 ini dapat tersusun, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Blitar, Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH



Drs. RUDY WIJONARKO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601219 198702 1 003

DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I - 4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I - 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II - 1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II - 1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II - 15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II - 30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III - 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III - 1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III - 5
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III - 9
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	III - 9
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III - 10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV - 1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V - 1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI - 1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII - 1
BAB VIII PENUTUP	VIII - 1

DAFTAR TABEL

		hal
Tabel 2.2.1.1	Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin	II - 15
Tabel 2.2.1.2	Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon	II - 15
Tabel 2.2.1.3	Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	II - 16
Tabel 2.2.1.4	Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan	II - 16
Tabel 2.2.2.1	Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	II - 17
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah	II - 19
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2011–2017	II - 20
Tabel 2.3.2	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2011–2016 ..	II - 23
Tabel 2.4.1	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah	II - 30
Tabel 3.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	III - 3
Tabel 3.2.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar	III - 7
Tabel 3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pelayanan Sekretariat Daerah	III - 9
Tabel 3.5.4.1	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Sekretariat Daerah	III - 13
Tabel 4.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah 2016-2017	IV - 2
Tabel 4.1.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah 2018	IV - 7
Tabel 4.1.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah 2019 – 2021	IV - 10
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah	V - 2
Tabel 6.1.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah pada tahun 2016	VI - 2

		hal
Tabel 6.1.2	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah pada tahun 2017	VI - 64
Tabel 6.1.3	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah pada tahun 2018	VI - 101
Tabel 6.1.4	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah pada tahun 2019 – 2021	VI - 140
Tabel 7.1.1	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2017	VII - 1
Tabel 7.1.2	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018	VII - 2
Tabel 7.1.3	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD TAHUN 2019 – 2021	VII - 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika kehidupan bermasyarakat di Kota Blitar mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan, dimana hal tersebut mendorong Pemerintah Kota Blitar untuk mengimbangi perubahan dan tuntutan yang terjadi sebagai amanat yang diemban dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Sekretariat Daerah, sebagai organisasi perangkat daerah penyelenggara pemerintahan, dalam melaksanakan program kegiatan sesuai tugas, fungsi, dan tata kerjanya sehingga sehingga mencapai hasil yang diharapkan perlu menyusun dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 (1), (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dimana didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah serta diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Untuk teknis operasional penyusunan renstra berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada rancangan awal RPJMD yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD ;
2. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional ;
3. Rencana strategis perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan renja.

Dalam menyikapi pelaksanaan dan perkembangan yang ada, Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021 perlu diadakan review dan revisi supaya lebih SMART. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi review adalah :

1. Adanya penyederhanaan nama dan nomenklatur kegiatan dalam RKPD tahun 2019 – 2021 ;
2. Adanya perubahan sasaran dan indikator hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Blitar beserta OPD-nya ;
3. Adanya perubahan kebijakan terkait regulasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20105-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 78) ;
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana strategis Sekretariat Daerah untuk menjabarkan RPJMD Kota Blitar 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar serta sebagai pedoman umum (*guide line*) dan arahan bagi aparatur Sekretariat Daerah serta pihak – pihak yang berkepentingan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar antara lain :

1. Merumuskan tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah agar selaras dengan visi dan misi serta program prioritas yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.
2. Menentukan arah kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan tingkat kemampuan melaksanakan otonomi daerah.
3. Menggali kekurangan, potensi dan kemungkinan prospek pengembangan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar.
4. Menjamin keberlanjutan program yang telah dicapai sampai dengan tahun 2015. Artinya, apa yang sudah dicapai sampai dengan tahun 2015 harus terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya serta menghindari terjadinya kemandekan (*stagnasi*). Demi terwujudnya sinergitas, sinkronisasi, integrasi dan koordinasi yang harmonis antara OPD dan penerapan regulasi kebijakan Kepala Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Susunan Penulisan dilakukan dengan menggunakan susunan Bab yang meliputi 8 (delapan) bab, dengan urutan sebagai berikut:

- BAB I.** Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Review Renstra Perangkat daerah Tahun 2016 - 2021
- BAB II.** Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III.** Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah, mengemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu – isu strategis
- BAB IV.** Tujuan dan Sasaran, memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah
- BAB V.** Strategi dan Arah Kebijakan, mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
- BAB VI.** Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VII.** Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan, mengemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
- BAB VIII.** Penutup, berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Blitar, dimana pembentukan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf (*Staffing Unit*) Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang sekaligus merupakan pejabat struktural tertinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Sekretaris Daerah bertugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah ;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah ;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah ;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas diatas, Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan :

1. Merumuskan kebijakan umum untuk mendukung Walikota dalam penyelenggaraan tugas Perangkat Daerah ;

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

2. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat ;
3. Pengendalian penyelenggaraan tugas desentralisasi dan tugas-tugas pemerintahan yang lain ;
4. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah ;
5. Penyelenggaraan administrasi sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah ;
6. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
7. Pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Walikota sesuai peraturan perundang – undangan.

Dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2016 Bab III pasal 6 bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Sekretariat Daerah membentuk organisasi dengan susunan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan membawahi:
 - i. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama ;
 - ii. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan ;
 - iii. Sub Bagian Tata Laksana dan Kinerja.
 - b. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - i. Sub Bagian Perekonomian ;
 - ii. Sub Bagian Mental Spiritual ;
 - iii. Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Sosial.

- c. Bagian Hukum dan Organisasi membawahi:
 - i. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
 - ii. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi ;
 - iii. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kelembagaan.
- 3. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan terdiri dari:
 - a. Bagian Umum membawahi:
 - i. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Kearsipan ;
 - ii. Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset ;
 - iii. Sub Bagian Keuangan
 - b. Bagian Humas dan Protokol membawahi:
 - i. Sub Bagian Humas ;
 - ii. Sub Bagian Protokol.
 - c. Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan membawahi:
 - i. Sub Bagian Program dan Administrasi Pembangunan ;
 - ii. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan ;
 - iii. Sub Bagian Layanan Pengadaan.

Adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta mengendalikan sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada bagian tata pemerintahan, hukum dan organisasi, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan urusan penunjang kepegawaian dan sumber daya manusia, pengawasan serta BUMD dan koordinasi kerukunan umat beragama. Sedangkan fungsi yang melekat pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat antara lain:

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program pada bagian tata pemerintahan, hukum dan organisasi, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. pengoordinasian pembinaan dan pelayanan administratif di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- e. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh 3 (tiga) Bagian yaitu:

- a. Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan, memiliki tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan yang meliputi kecamatan dan kelurahan, otonomi daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta fasilitasi kerjasama antar daerah. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan umum dan administrasi kewilayahan yang meliputi kecamatan dan kelurahan, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta fasilitasi kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;

- 2) Pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan umum dan administrasi kewilayahan yang meliputi kecamatan dan kelurahan, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta fasilitasi kerjasama;
- 3) Penyusunan kebijakan, dan petunjuk teknis pendayagunaan, pembinaan kinerja aparatur;
- 4) Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis serta fasilitasi peningkatan pelayanan publik ;
- 5) Penyusunan kebijakan dan fasilitasi pembinaan ketatalaksanaan;
- 6) Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian pemerintahan umum dan kerjasama, pemberdayaan masyarakat, kecamatan dan kelurahan, tata laksana dan kinerja;
- 7) Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan umum dan administrasi kewilayahan yang meliputi kecamatan dan kelurahan, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta fasilitasi kerjasama;
- 8) Pembinaan, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan sub bagian pemerintahan umum dan kerjasama, pemberdayaan masyarakat, kecamatan dan kelurahan, tata laksana dan kinerja;
- 9) Penyelenggaraan kegiatan administrasi pada sub bagian pemerintahan umum dan kerjasama, pemberdayaan masyarakat, kecamatan dan kelurahan, tata laksana dan kinerja dan pelaporan;
- 10) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Bagian Hukum dan Organisasi

Bagian Hukum dan Organisasi yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan produk hukum daerah, mengkaji dan mengevaluasi produk hukum daerah, memberikan bantuan hukum kedinasan, sosialisasi, penyuluhan hukum dan mendokumentasikan produk - produk hukum daerah dan produk hukum lainnya, mengembangkan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta menyiapkan perumusan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang hukum dan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah ;
- 2) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas penyusunan produk hukum daerah, publikasi dan pembinaan hukum serta dokumentasi dan pengkajian hukum ;
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan dibidang hukum dan kelembagaan ;
- 4) Penyusunan materi rancangan peraturan perundang - undangan daerah ;
- 5) Pengkajian dan evaluasi peraturan perundang - undangan daerah ;
- 6) Pemberian bantuan hukum kedinasan ;
- 7) Sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dan penyuluhan hukum ;
- 8) Inventarisasi, dokumentasi dan distribusi peraturan perundangan -undangan daerah dan peraturan lainnya ;
- 9) Pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum ;
- 10) Pelaksanaan evaluasi dan perumusan kebutuhan kelembagaan perangkat daerah ;
- 11) Penyusunan kebijakan dan fasilitasi penataan lembaga perangkat daerah ;
- 12) Pengolahan, penyusunan dan pelaksanaan analisis dan standarisasi jabatan ;
- 13) Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang perekonomian, mental spiritual, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, pemuda dan olah raga, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian serta kerukunan umat beragama. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang perekonomian, mental spiritual, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, pemuda dan olah raga, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian serta kerukunan umat beragama ;
- 2) Pelaksanaan koordinasi di bidang perekonomian, mental spiritual, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, pemuda dan olah raga, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian serta kerukunan umat beragama ;
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perekonomian, mental spiritual, pendidikan kesehatan kebudayaan dan social ;
- 4) Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian, mental spiritual, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan

dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, pemuda dan olah raga, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian serta kerukunan umat beragama ;

- 5) Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan badan usaha milik daerah dan perbankan daerah ;
- 6) Pengumpulan, penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan ;
- 7) Pengoordinasian perumusan pedoman pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan produksi berbagai komoditi daerah ;
- 8) Pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program serta petunjuk teknis pembinaan, pemantauan perkembangan sarana perekonomian daerah ;
- 9) Pemantauan dan analisis pemanfaatan dana daerah yang digulirkan kepada masyarakat ;
- 10) Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM ;
- 11) Pembinaan, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan pada sub bagian perekonomian, mental spiritual, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sosial ;
- 12) Penyelenggaraan kegiatan administrasi pada sub bagian pada sub bagian perekonomian, mental spiritual, pendidikan kesehatan kebudayaan dan sosial serta pelaporan;
- 13) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan

Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta mengendalikan sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, Pembangunan dan Layanan Pengadaan serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum dan penataan

ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, ESDM, dan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan serta fasilitasi pimpinan dan forum pimpinan daerah. Sedangkan fungsi yang melekat pada Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan antara lain:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program pada bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, Pembangunan dan Layanan Pengadaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan;
- d. Pengoordinasian pembinaan dan pelayanan administratif di bidang Administrasi Umum dan Pembangunan;
- e. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan dibantu oleh 3 (tiga) Bagian yaitu:

- a. Bagian Umum

Bagian Umum yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha pimpinan dan sekretariat daerah, pengelolaan kepegawaian dan kearsipan sekretariat daerah urusan rumah tangga dan aset sekretariat daerah, serta pengelolaan keuangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan umum;
- 2) pelaksanaan kegiatan kearsipan di lingkungan sekretariat daerah;
- 3) pelaksanaan pelayanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah;
- 4) pengelolaan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5) pelaksanaan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
- 6) pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah ;

- 7) pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah;
 - 8) penyelenggaraan urusan penerimaan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - 9) pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengadministrasian aset Sekretaris Daerah;
 - 10) pengelolaan dan pengendalian kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah
 - 11) pengelolaan dan pengendalian perjalanan dinas pimpinan dan umum;
 - 12) pelaksanaan koordinasi administrasi dan pembayaran gaji;
 - 13) penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - 14) pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan keuangan dan barang daerah;
 - 15) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bagian Humas dan Protokol

Bagian Humas dan Protokol yang dipimpin oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas mengelola informasi dan dokumentasi pimpinan daerah, melaksanakan urusan protokoler daerah serta menyiapkan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 2) Menyusun dan melaksanakan rencana program dan / atau kegiatan humas dan protokol ;
- 3) Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 4) Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan protokol berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sekretaris daerah;

- 5) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas peliputan, pemberitaan, kerja sama media dalam rangka fasilitasi kegiatan pimpinan daerah;
 - 6) Penyusunan program dan/atau kegiatan di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
 - 7) Penyusunan naskah informasi walikota ;
 - 8) Perencanaan dan pelaksanaan jumpa pers dengan walikota ;
 - 9) Penyusunan dan penyelenggaraan acara protokoler dinas ;
 - 10) Pelaksanaan dokumentasi kegiatan walikota;
 - 11) Pelaksana juru bicara pemerintah daerah sesuai dengan petunjuk walikota;
 - 12) Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan tugas peliputan, pemberitaan, kerja sama media rangka fasilitasi kegiatan pimpinan daerah;
 - 13) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan sekretariat daerah secara berkala melalui *sub domain website* pemerintah daerah;
 - 14) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi sekretariat daerah;
 - 15) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang hubungan masyarakat;
 - 16) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan

Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan kebijakan urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, kehutanan, ESDM dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan serta mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik daerah, perencanaan program sekretariat daerah serta memfasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Sedangkan fungsinya adalah:

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

- 1) Perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, kehutanan, ESDM dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Sekretaris Daerah;
- 2) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas administrasi pembangunan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, fasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar serta penyusunan program dan pelaporan kinerja sekretariat daerah;
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan di bagian pembangunan dan layanan pengadaan;
- 4) Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah;
- 5) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan / progres pelaksanaan pembangunan daerah;
- 6) Pengoordinasian administrasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah;
- 7) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP ;
- 8) Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- 9) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Walikota;
- 10) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- 11) Menugaskan/ menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing- masing Kelompok Kerja ULP;
- 12) Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada Walikota, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;

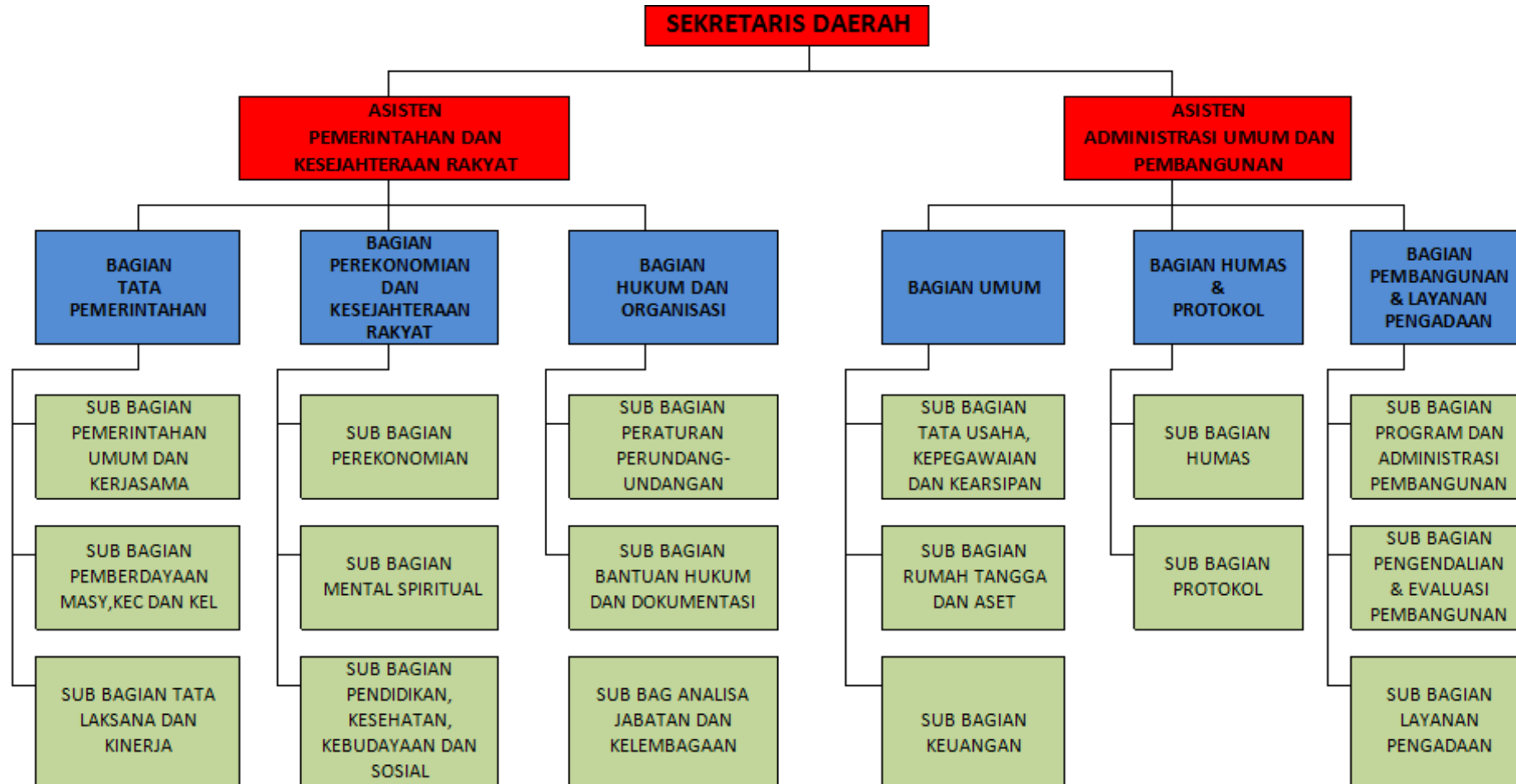
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

- 13) Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP;
- 14) Fasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE (*e-procurement*);
- 15) Melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan;
- 16) Mengelola system informasi manajemen pengadaan barang/jasa yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia;
- 17) Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan tugas Layanan Pengadaan;
- 18) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- 19) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- 20) Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 21) Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- 22) Penyusunan dan pembuatan Laporan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
- 23) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan.
- 24) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sebagai gambaran akan Susunan Organisasi hubungan antar unsur pada Sekretariat Daerah dapat disajikan pada bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR



Sumber : Perwali Kota Blitar Nomor 56 Tahun 2016

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau aparatur pada Sekretariat Daerah adalah sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1
Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	L	P	TOTAL
1	SETDA	3	0	3
2	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	6	3	9
3	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	3	6	9
4	BAGIAN PEREKONOMIAN KESRA	5	4	9
5	BAGIAN UMUM	16	16	32
6	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	6	5	11
7	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LP	6	3	9
	JUMLAH	45	37	82

Sumber : BKD Kota Blitar, 2018

Tabel 2.2.1.2
Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah
Berdasarkan Eselon

NO	URAIAN	ESELON						TOTAL
		II A	II B	III A	III B	IV A	IV B	
1	SETDA	1	2	0	0	0	0	3
2	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	0	1	1	0	3	0	5
3	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	0	0	1	0	3	0	4
4	BAGIAN PEREKONOMIAN KESRA	0	0	1	0	3	0	4
5	BAGIAN UMUM	0	1	1	0	3	0	5
6	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	0	0	1	0	2	0	3
7	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LP	0	0	1	0	3	0	4
	JUMLAH	1	4	6	0	17	0	28

Sumber : BKD Kota Blitar, 2018

Tabel 2.2.1.3
Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah
Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	S3	TOTAL
1	SETDA	0	0	0	0	1	2	0	3
2	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	0	0	2	2	3	2	0	9
3	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	0	0	2	0	7	0	0	9
4	BAGIAN PEREKONOMIAN KESRA	0	1	3	0	5	0	0	9
5	BAGIAN UMUM	2	1	14	5	9	1	0	32
6	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	0	0	4	1	5	1	0	11
7	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LP	0	0	1	4	3	1	0	9
	JUMLAH	2	2	26	12	33	7	0	82

Sumber : BKD Kota Blitar, 2018

Tabel 2.2.1.4
Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah
Berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	GOLONGAN				TOTAL
		I	II	III	IV	
1	SETDA	0	0	0	3	3
2	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	0	2	5	2	9
3	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	0	0	8	1	9
4	BAGIAN PEREKONOMIAN KESRA	1	2	5	1	9
5	BAGIAN UMUM	1	18	11	2	32
6	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	0	5	5	1	11
7	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LP	0	2	6	1	9
	JUMLAH	2	29	40	11	82

Sumber : BKD Kota Blitar, 2018

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.2.1
Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah

GOL	KODE	NAMA BARANG	JUM LAH	HARGA
1	2	3	4	5
01		GOLONGAN TANAH	41	110.117.306.507
	01.11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	37	82.606.756.507
	01.13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	4	27.510.550.000
02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	2826	26.553.218.790,07
	02.03	Alat-alat Bantu	4	606.800.000
	03.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	117	10.383.712.273,10
	03.02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	8	176.504.250
	04.01	Alat Bengkel Bermesin	1	9.791.666,62
	05.01	Alat Pengolahan	2	2.437.500
	05.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	6	64.000.000
	06.01	Alat Kantor	266	1.502.479.872,01
	06.02	Alat Rumah Tangga	1151	6.488.168.880,01
	06.03	Komputer	627	2.937.483.038,69
	06.04	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	207	541.121.429,96
	07.01	Alat Studio	159	1.463.811.581,68
	07.02	Alat Komunikasi	181	916.795.839
	07.03	Peralatan Pemancar	15	255.637.000
	08.02	Alat Kesehatan	5	98.512.500
	09.01	Unit-Unit Laboratorium	33	68.210.500
	09.02	Alat Peraga/Praktek Sekolah	25	949.015.959
	09.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1	6.594.000
	09.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1	3.000.000
	09.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8	29.969.000
	09.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	1	3.500.000
	11	Alat Ukur	8	45.673.500
03		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	28	16.077.945.425
	11.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	21	13.730.979.350
	11.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7	2.346.966.075
04		GOLONGAN JALAN/ IIRIGASI DAN JARINGAN	6	953.774.100
	15.01	Instalasi Air Minum/Bersih	0	12.500.000
	15.06	Instalasi Gardu Listrik	2	445.337.500
	16.01	Jaringan Air Minum	1	235.751.400
	16.02	Jaringan Listrik	3	260.185.200
05		GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	327	605.390.600,18
	17.01	Buku	290	63.535.000,18
	18.01	Barang Bercorak Kebudayaan	31	466.258.600
	19.01	Hewan	1	16.219.500
	19.02	Tumbuhan	5	59.377.500
07		ASET TIDAK BERWUJUD	17	802.097.000
		Software	17	802.097.000

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

GOL	KODE	NAMA BARANG	JUM LAH	HARGA
08		ASET KEMITRAAN	1	3.114.000.000
		Aset-Aset Kemitraan	1	3.114.000.000
		JUMLAH	3246	158.223.732.422,25

Sumber : BPKAD Kota Blitar, 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran atas kinerja perangkat daerah merupakan proses berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan suatu Organisasi Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja kegiatan ini didasarkan atas 3 (tiga) indikator capaian kinerja yaitu *input* (masukan), *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil), sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagaimana tersebut pada Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2017	REALISASI CAPAIAN						RASIO CAPAIAN TAHUN 2017
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi	-	-	-	10%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	50%
2	Persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	-	-	-	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	94%
3	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	-	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
5	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
6	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	-	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7	Nilai SAKIP Setda minimal B	-	-	-	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CC	0%
8	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	-	-	-	90%	N/A	N/A	N/A	91,57%	89,72%	96,69%	107%

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2017

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN							REALISASI CAPAIAN TAHUN							RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	5%	10%	0%	0%	0%	0%	4%	9%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	80%	90%	
2	Persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	
3	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	
4	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	
5	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN							REALISASI CAPAIAN TAHUN							RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
8	Nilai SAKIP Setda	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CC	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	100%
9	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	90%	90%	N/A	N/A	N/A	92%	90%	97%	89%	N/A	N/A	N/A	N/A	106%	107%	98%
10	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BAIK	BAIK	N/A	N/A	N/A	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN							REALISASI CAPAIAN TAHUN							RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BAIK	BAIK	N/A	N/A	N/A	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	
12	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumahtanggaan	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BAIK	BAIK	N/A	N/A	N/A	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	
13	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BAIK	BAIK	N/A	N/A	N/A	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	
14	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BAIK	BAIK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BAIK	BAIK	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Tabel 2.3.2
 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2017

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN							REALISASI CAPAIAN TAHUN							RASIO CAPAIAN PADA TAHUN							RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
1	PENDAPATAN	159.156.000	4.500.000	2.000.000	0	0	0	3.500.000	185.409.207	0	0	0	5.729	0	3.500.000	116%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	159.156.000	4.500.000	2.000.000	0	0	0	3.500.000	185.409.207	0	0	0	5.729	0	3.500.000	116%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	159.156.000	4.500.000	2.000.000	0	0	0	0	185.409.207	0	0	0	5.729	0	0	116%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN							REALISASI CAPAIAN TAHUN							RASIO CAPAIAN PADA TAHUN							RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
	Jumlah	159.156.000	4.500.000	2.000.000	0	0	0	3.500.000	185.409.207	0	0	0	5.729	0	3.500.000	116%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	
2	BELANJA	27.559.862.844	24.830.421.675,89	36.988.071.730	33.921.579.413,71	30.661.019.312,48	33.261.132.396	41.026.167.286	26.817.201.725	23.501.078.606	33.809.154.523	27.985.839.002	28.354.412.408,22	31.087.392.122	37.407.616.144	97%	95%	91%	83%	92%	93%	91%	8,8%	7,6%	
2.1	BELANJA OPERASI	23.213.489.374	21.514.033.393,89	24.911.659.010	26.025.829.638,71	25.124.464.237,48	29.839.856.096	37.170.232.236	22.535.683.025	20.297.497.256	23.365.066.648	20.373.022.452	22.969.908.208,22	27.815.432.237	33.927.437.256	97%	94%	94%	78%	91%	93%	91%	8,8%	8,0%	

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN							REALISASI CAPAIAN TAHUN							RASIO CAPAIAN PADA TAHUN							RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
2.1.1	Belanja Pegawai	12.611.420.044	6.943.950.544,89	6.598.394.710	7.091.614.348,71	7.142.496.092,48	8.288.730.919	7.888.714.500	12.371.228.071	6.426.717.720	6.287.146.102	6.044.808.884	6.755.803.388	7.765.514.520	6.655.694.022	98%	93%	95%	85%	95%	94%	84%	-5,1%	-6,9%
2.1.2	Belanja Barang	10.602.069.330	14.570.082.849	18.313.264.300	18.934.215.290	17.981.968.145	21.551.125.177	29.281.517.736	10.164.454.954	13.870.779.536	17.077.920.546	14.328.213.568	16.214.104.820,22	20.049.917.717	27.271.743.234	96%	95%	93%	76%	90%	93%	93%	19,5%	19,4%
2.2	BELANJA MODAL	4.346.373.470	3.316.388.282	12.076.412.720	7.895.749.775	5.536.555.075	3.421.276.300	3.855.935.050	4.281.518.700	3.203.581.350	10.444.087.875	7.612.816.550	5.384.504.200	3.271.959.885	3.480.178.888	99%	97%	86%	96%	97%	96%	90%	25,1%	18,6%
2.2.1	Belanja Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.067.373.470	3.164.132.282	11.989.482.720	6.828.691.775	3.576.061.975	1.629.908.800	1.961.714.050	3.021.270.650	3.051.725.350	10.393.286.375	6.578.687.450	3.430.886.000	1.561.500.385	1.637.635.888	98%	96%	87%	96%	96%	83%	26,2%	17,9%	

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN							REALISASI CAPAIAN TAHUN							RASIO CAPAIAN PADA TAHUN							RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.058.500.000	21.156.000	36.000.000	701.008.000	1.830.393.100	1.727.500.000	1.696.741.000	1.040.748.050	21.156.000	0	671.279.200	1.824.279.000	1.648.094.500	1.646.053.000	98%	100%	0%	96%	100%	0%	97%	328,9%	0,0%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	75.400.000	35.000.000	350.000.00	75.000.000	0	0	0	75.050.000	34.951.500	74.645.200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0,0%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	166.600.000	55.700.000	15.930.000	16.050.000	5.100.000	13.867.500	197.480.000	165.600.000	55.650.000	15.850.000	13.850.000	5.100.000	12.865.000	196.490.000	99%	100%	99%	86%	100%	93%	99%	215,1%	227,6%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	53.900.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000		53.900.000	0	0	0	49.594.000	0	100%	0%	0%	0%	0%	99%	0%	0%	0%	0%
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah	27.559.862.844	24.830.421.675,89	36.988.071.730	33.921.579.413,71	30.661.019.312,48	33.261.132.396	41.026.167.286	26.817.201.725	23.501.078.606	33.809.154.523	27.985.839.002	28.354.412.408,22	31.087.392.122	37.407.616.144	97%	95%	91%	83%	92%	93%	91%	8,8%	7,6%

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN							REALISASI CAPAIAN TAHUN							RASIO CAPAIAN PADA TAHUN							RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
2.4	TRANSFER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	Jumlah Belanja	27.559.862.844	24.830.421.675,89	36.988.071.730	33.921.579.413,71	30.661.019.312,48	33.261.132.396	41.026.167.286	26.817.201.725	23.501.078.606	33.809.154.523	27.985.839.002	28.354.412.408,22	31.087.392.122	37.407.616.144	97%	95%	91%	83%	92%	0%	91%	8,8%	7,6%
	Surplus/(Defisit)	-27.400.706.844	-24.825.921.675,89	-36.986.071.730	-33.921.579.413,71	-30.661.019.312,48	-33.261.132.396	-41.022.667.286	-26.631.792.518	-23.501.078.606	-33.809.154.523	-27.985.839.002	-28.354.406.679,22	-31.087.392.122	-37.404.116.144	97%	95%	91%	83%	92%	0%	91%	8,9%	7,7%
3	PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.467.818	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN							REALISASI CAPAIAN TAHUN							RASIO CAPAIAN PADA TAHUN							RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI	
3.1	PENERIMAAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	PENGELUARAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN							REALISASI CAPAIAN TAHUN							RASIO CAPAIAN PADA TAHUN							RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-27.400.706,844	-24.825.921,675,89	-36.986.071,730	-33.921,579,413,71	-30.661,019,312,48	-33.261,132,396	-41,022,667,286	-26,631,792,518	-23,501,078,606	-33,809,154,523	-27,985,839,002	-28,438,874,497,22	-31,087,392,122	-37,404,116,144	97%	95%	91%	83%	93%	93%	91%	8,9%	7,7%

Sumber : BPKAD Kota Blitar, 2018

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam mengembangkan pelayanan Sekretariat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL		
NO	PELUANG	TANTANGAN
1	Terkoordinasinya antara masyarakat dengan pemerintah, dan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan bermitra kerja terhadap proses pembangunan sosial, merupakan suatu peluang dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan	Mengingat belum seluruhnya masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan urusan sosial, maka merupakan suatu tantangan untuk mengoptimalkan peran aktif lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan melalui regulasi kebijakan sosial
2	Adanya data-data urusan sosial kemasyarakatan yang akurat memberikan kelancaran dalam penyampaian informasi yang cepat dan tepat, serta memudahkan dalam penyusunan kebijakan sosial	Populasi yang tidak terkendali dapat memicu timbulnya permasalahan sosial, diantaranya meningkatnya jumlah rumah tangga miskin, pencari kerja (pengangguran), dan masalah sosial lainnya
3	Keterlibatan OPD terkait dalam penanganan masalah sosial merupakan peluang dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan guna menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaannya	Merupakan suatu tantangan dalam memadukan data dan informasi, mengingat masing-masing OPD berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang selama ini dijalankan
4	Dinamisnya produk hukum menjamin adanya kepastian hukum bagi pengambil kebijakan di daerah	Pemerintah daerah harus menganalisa dan mengkaji produk hukum sebelum menerapkannya di daerah sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik di masyarakat
5	Teknologi informasi di bidang hukum yang semakin berkembang memudahkan terpublikasinya produk hukum sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat	Tuntutan transparansi kepada Pemerintah Daerah sehingga diperlukan kecermatan dan ketelitian sebelum produk hukum dipublikasikan melalui media yang dapat diakses masyarakat
6	Dinamisnya perkembangan ilmu hukum memudahkan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan bagi permasalahan di daerah yang semakin kompleks	Perlunya penguatan kualitas SDM aparatur bagian hukum sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan kualitas analisa hukum sebagai bahan pengambilan kebijakan daerah
7	Deregulasi media massa dan perkembangan teknologi media massa menjadikan informasi pemerintahan dan pembangunan semakin mudah diproduksi dan disebarluaskan kepada masyarakat.	Berlakunya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengharuskan Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik dengan segala hak dan kewajibannya.
8	Semakin menguatnya pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap tata aturan keprotokolan menjadikan acara dan kegiatan lebih tertib dan sesuai standard dan etika keprotokolan.	Berlakunya Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan mengharuskan penataan kembali dalam hal tata tempat, tata penghormatan, tata upacara serta memerlukan adaptasi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.
9	Saat ini kelembagaan sudah ada dan terus disesuaikan dengan peraturan perundangan tentang Organisasi Perangkat Daerah	Belum adanya mekanisme tata kerja yang diatur resmi.

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2016-2021

ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL		
NO	PELUANG	TANTANGAN
10	Adanya kemudahan dalam akses dan pengambilan data yang terintegrasi	Semakin mudahnya pengambilan data menuntut cepatnya pelayanan kepada OPD
11	Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kecamatan dan Kelurahan	Perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih erat terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Kecamatan dan Kelurahan

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks berdasarkan kondisi masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagai berikut:

1. Besarnya rentang kendali di internal Sekretariat Daerah 6 Bagian menjadikan perlunya koordinasi ekstra utamanya di bidang kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum di internal Sekretariat Daerah.
2. Belum terwujudnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya air, listrik dan telepon, dikarenakan masih tergabung area Kantor Sekretariat dengan Badan, Dinas dan Kantor lain, sehingga sulit untuk mengendalikan/mengontrol penggunaannya.
3. Keterbatasan kemampuan aparaturnya pemerintah daerah dalam mengkaji dan menganalisa dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan serta menghasilkan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota yang dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik di masyarakat.
4. Belum terpublikasikannya produk hukum dan kebijakan daerah secara maksimal melalui media cetak, elektronik dan media online yang dapat diakses masyarakat sebagai upaya memenuhi tuntutan transparansi.

5. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bagian sebagai salah satu unit kerja Sekretariat Daerah yang menjalankan fungsi manajemen sebagai unsur staffing bukan sebagai pelaksana teknis daerah.
6. Fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pada bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah terkesan sama dengan monev yang dilaksanakan oleh Bappeda, sehingga pelaksanaannya kurang bermanfaat
7. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja
8. Belum tersedianya data – data kemasyarakatan dan keagamaan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan
9. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional
10. Belum optimalnya humas dan protokol dalam menyesuaikan diri dengan perubahan paradigma fungsi humas seiring dengan lahirnya Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik.
11. Keterbatasan kemampuan adaptasi OPD dan seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
12. Belum intensifnya koordinasi dan komunikasi antara sekretariat daerah dengan Kecamatan dan Kelurahan terkait pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan.

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN OPD)	
Rentang kendali Organisasi	Setda terdiri dari 6 bagian	Standar Beban Kerja dan Analisis Jabatan	Adanya Perubahan Perda Struktur Organisasi Pemda	Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016	Kurangnya jumlah staf dalam rangka optimalisasi tupoksi
Dinamika Produk Hukum daerah	Sinkronisasi produk hukum satu dengan produk hukum lainnya	Standar/SOP Pembuatan Perda, Perwali, Keputusan Walikota	Pembuatan Draft Perda dan Perwali serta Keputusan Walikota	Adanya kebijakan dan aturan dari Pemerintah Pusat yang tidak jarang kurang sinkron satu dengan lainnya	Kurangnya sinkronisasi produk hukum satu dengan produk hukum lainnya
Ketersediaan Data kemasyarakatan dan Keagamaan	Data Sudah ada tetapi perlu dilengkapi dan divalidasi	SOP Penyaluran Dana Hibah/Bansos, SOP Perumusan Kebijakan di bidang Sosial dan Kesra	Pembuatan Kebijakan di bidang sosial, keagamaan, dan kesra	Telah ada data PPLS dari BPS	Kurangnya Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan
Pembedaan Fungsi Staffing dan Fungsi Lini	Setda terus berupaya diposisikan sebagai perumus kebijakan atau Fungsi Staffing	Perda SOTK, Tugas Pokok Fungsi OPD dalam Peraturan Wali Kota,	Saat ini Telah ada SOTK dan Perwali Tentang Kelembagaan dan Tupoksi Setda	Setda Perlu lebih diarahkan fungsinya menuju fungsi Staffing	Kurangnya Tepatnya Fungsi Setda yang dalam kenyataannya masih menjalankan fungsi lini dan fungsi staff.

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN OPD)	
Perubahan paradigma Kehumasan dan Keprotokolan	Fungsi Kehumasan dan keprotokolan telah berjalan namun perlu menyesuaikan dengan aturan baru	Standar Informasi Publik, Standar Kehumasan Pemerintah, dan Standar keprotokolan	Tingkat Ketrampilan / Skill Aparatur dalam menjalankan fungsi Kehumasan dan Keprotokolan	Terbitnya UU No 9 Tahun 2010 tentang keprotokolandan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kurangnya pemahaman terhadap paradigma kehumasan dan keprotokolan yang baru
Updating sistem Informasi elektronik dalam hal evaluasi Pelaksanaan kegiatan	Telah ada admin e-monev namun perlu ditingkatkan lagi Sinkronisasi	Standar Ketepatan Waktu dan Akurasi Data E-Monev dari Seluruh OPD	- Pembinaan terhadap admin e-monev - pengendalian pelaksanaan kegiatan (monitoring)	updating data dari OPD pelaksana kegiatan	Kurangnya pembinaan terhadap admin e-monev, kurangnya pengendalian pada pelaksanaan kegiatan
Kebijakan Ekonomi Kreatif Tanpa Meninggalkan Ekonomi Kerakyatan	Telah ada beberapa kajian ekonomi kreatif tetapi masih belum ada fokus	Sub-Sub Sektor ekonomi kreatif	Kebijakan dan format ekonomi kreatif kota blitar	Pemberlakuan MEA	Kurangnya Sinkronisasi Kebijakan dan Format Ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Permasalahan pelayanan OPD berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya Jumlah Staf dalam rangka optimalisasi Tupoksi
2. Kurang tepatnya fungsi Setda yang masih mengerjakan sebagian fungsi lini
3. Kurangnya Sinkronisasi Produk Hukum Satu dengan Produk Hukum Lainnya
4. Kurangnya Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan
5. Kurangnya pemahaman terhadap paradigma kehumasan dan keprotokolan yang baru
6. Kurangnya penerapan fungsi pengendalian, evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dengan memanfaatkan sistem e-monev
7. Kurangnya Sinkronisasi Kebijakan dan Format Ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka mendukung Visi Walikota dan Wakil Walikota Blitar maka program Sekretariat Daerah Kota Blitar tidak lepas dari visi, misi dan program Kota Blitar. Sedangkan Visi Kota Blitar periode 2016 – 2021 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

**“ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat
pada Tahun 2021”**

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 misi yaitu :

1. Meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang Cerdas dan berdaya saing tinggi.

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
4. Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso
6. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Blitar terkait dengan tugas dan fungsi masing masing bagian Sekretariat daerah adalah pada misi 1 (satu) yaitu Meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat dan misi 6 (enam) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi bagian-bagian di sekretariat daerah adalah meningkatkan kerukunan umat beragama dengan sasaran meningkatnya kemakmuran tempat ibadah dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Intervensi sekretariat daerah adalah pada capaian indikator sasaran prosentase tempat ibadah yang aktif, rasio pengajar ilmu gama dengan jumlah penduduk, nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kota (nilai SAKIP), dan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota blitar (nilai LPPD).

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2016 - 2021 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 6 (enam) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Bagian-Bagian Di Sekretariat Daerah sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan, sebagaimana diuraikan tabel 3.2.1 berikut ini :

Tabel 3.2.1
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
 Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar

NO	MISI WALIKOTA BLITAR DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran beragama masyarakat - Rendahnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama 	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan organisasi/ kelompok keagamaan yang belum berpengaruh terhadap masyarakat sekitar - Kurangnya aktivitas/kegiatan di tempat ibadah - Lemahnya peran dan fungsi tenaga pengajar agama - Kurangnya koordinasi bidang sosial keagamaan antara masyarakat dengan pemerintah - Kurangnya Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan eksistensi organisasi/ kelompok keagamaan di tingkatan masyarakat - Meningkatkan fungsi tempat ibadah melalui fasilitasi kegiatan - Meningkatkan fasilitasi dan peran tenaga pengajar agama - Peningkatan koordinasi bidang sosial keagamaan antara pemerintah dengan masyarakat
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> - Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya kualitas SDM (sumber daya manusia) yang ada dalam organisasi - Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja - Masih lemahnya pemahaman Tupoksi aparat sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi baik antar elemen dalam organisasi maupun antar instansi/ lembaga terkait 	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO	MISI WALIKOTA BLITAR DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan indikator kinerja utama yang belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) - Belum termanfaatkannya IKU di dalam dokumen perencanaan - Belum maksimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dibuktikan dengan hasil penilaian terhadap LPPD dan LAKIP yang belum sesuai yang diharapkan - 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman yang beranekaragam dari masing-masing SKPD tentang aturan aturan terkait dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja - Adanya mutasi personal penyusun SAKIP - Belum maksimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dibuktikan dengan hasil penilaian terhadap LPPD dan LAKIP yang belum sesuai yang diharapkan - Sumberdaya Manusia yang terbatas, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dibandingkan dengan beban kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Tata Pemerintahan - Belum tersedianya data yang valid dan akurat mengenai pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana masih terdapat beberapa versi data yang berbeda yang menyulitkan ketika proses analisa data untuk dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu sinkronisasi dan validasi data yang melibatkan tim teknis lintas OPD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pimpinan SKPD terhadap penerapan SAKIP - Motivasi dan semangat seluruh personil bagian Tata Pemerintahan dan juga diimbangi dengan suasana kerja dan hubungan kerja yang harmonis dan kondusif antar seluruh personil dalam menghadapi tantangan dan beban kerja yang ada. - Jalinan komunikasi yang baik antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan dengan seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Blitar, termasuk juga jalinan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Blitar dengan Bagian Pemerintahan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar, maka tidak dilakukan telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, sebab tidak ada yang berkorelasi dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. Adapun faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Tabel 3.4.1 sebagai berikut:

Tabel 3.4.1
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pelayanan Sekretariat Daerah

No.	Rencana Tata Ruang Kota Blitar sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	Permasalahan dalam Pelayanan Sekretariat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pengembangan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang hubungan antar kawasan	Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah	Kurangnya pemahaman OPD bahwa Sekretariat Daerah adalah pengoordinasi kebijakan daerah	Fungsi Sekretariat Daerah sebagai pelayan administratif instansi daerah
2	Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau			

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah terdapat beberapa hal yang menjadi acuan:

3.5.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sebagai Organisasi penyusun kebijakan Sekretariat Daerah memegang kunci arah kebijakan Kota Blitar, hal ini tentunya banyak memperoleh hambatan maupun tantangan.

3.5.2 Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 adalah penataan kebijakan dan kelembagaan 2016-2021 dengan memprioritaskan penataan kebijakan dan kelembagaan perangkat daerah yang bersih, demokratis, partisipatif dan akuntabel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3.5.3 Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah bagi pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif sebenarnya tidak memiliki implikasi langsung terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, namun setiap kebijakan yang dikeluarkan harus selalu mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah diterbitkan produk hukumnya sehingga pembangunan di Kota Blitar berjalan sesuai koridornya.

3.5.4 Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan Sekretariat Daerah

Seperti halnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap pelayanan Sekretariat Daerah

tidak memiliki implikasi secara langsung, namun setiap kebijakan yang dikeluarkan harus selalu mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga Pembangunan Kota Blitar akan berwawasan lingkungan guna peningkatan kualitas tata ruang serta peningkatan daya dukung lingkungan.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan Isu-isu strategis di Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 Cukup Memuaskan dengan predikat sangat tinggi, akan tetapi perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar mendapatkan peringkat 10 besar secara nasional secara terus menerus.
2. Frekuensi dan kualitas kerjasama antar Pemerintah Daerah masih kurang maksimal, sehingga perlu dilakukan penjajakan kerjasama Antar Daerah terutama dengan Daerah yang mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan Kota Blitar, dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Blitar (Terutama dalam bidang Tehnologi Informasi, Pariwisata, Pendidikan, dan lain-lain).
3. Masih kurangnya kualitas komunikasi dengan Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Masyarakat yang ada di Kecamatan dan Kelurahan, sehingga perlu secara rutin dilaksanakan atensi dan komunikasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan.
4. Ketidakharmonisan Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya.
5. Perlunya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Atas Kebutuhan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara Lengkap, Akurat, Mudah dan Cepat.
6. Banyaknya Permasalahan Hukum terkait Pelaksanaan Tugas-Tugas Kedinasan
7. Perlunya peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama agar semakin kondusif serta untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan YME.
8. Semakin tingginya minat masyarakat untuk berurusan di Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, utamanya terkait dengan permohonan bantuan sosial dan hibah.

9. Perlunya regulasi pengelolaan kegiatan raskin/rastra melalui Tim Tingkat Kota, mulai dari perencanaan, kelancaran pelaksanaan, sampai dengan pelaporannya.
10. Perlunya data base yang akurat meliputi : data rumah tangga miskin, fakir miskin, janda miskin, anak yatim, pengajar agama non formal, tokoh agama, tempat ibadah, yayasan/panti sosial, dll
11. Perlunya peningkatan pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar
12. Perlunya penanganan Inflasi Daerah yang berkesinambungan.
13. Perlunya pengembangan BUMD
14. Perlunya pengembangan Ekonomi Kreatif untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat
15. Perlunya koordinasi yang lebih intensif terkait pemanfaatan DBHCHT.
16. Perlunya peningkatan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan guna mempercepat penyerapan APBD sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan
17. Perlunya peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam merumuskan kebijakan di bidang administrasi pembangunan
18. Percepatan Realisasi Anggaran perlu didukung dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang akuntabel, efektif dan efisien.
19. Adanya Dinamisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa sehingga setiap Personil Organisasi Pengadaan wajib untuk selalu meningkatkan pengetahuan perihal Pengadaan Barang/Jasa.
20. Penguatan kelembagaan yang kaya fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
21. Inovasi Pelayanan Publik dalam meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat.
22. Kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah melalui penilaian SAKIP (melalui Integrasi Data RPJMD, RENSTRA, RENJA, Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran kinerja dalam pelaporan capaian kinerja dan keuangan)
23. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui instrumen standarisasi pelayanan publik seperti standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

24. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
25. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur;
26. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada.
27. Kewajiban Perusahaan Pers berbentuk PT dan Wartawan Wajib Lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW);
28. Perlunya Pengembangan CITY BRANDING dan Peningkatan Publikasi di Media Nasional;
29. Relasi Pemerintah Daerah dengan Unsur FORKOPIMDA Sesuai Undang-Undang Keprotokolan Nomor 9 tahun 2010 ;

Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel 3.5.4.1 berikut:

Tabel 3.5.4.1
Identifikasi Isu-Isu Strategis
(Lingkungan Eksternal) Sekretariat Daerah

NO	ISU - ISU STRATEGIS			
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL / LOKAL	LAIN-LAIN
1	Trend Pemerintahan Dunia yang mengarah pada isu desentralisasi dan perluasan otonomi daerah	Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2016	Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan perumus kebijakan Kepala Daerah harus mampu melahirkan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundangan sekaligus sesuai dengan karakteristik potensi lokal
2	Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mengharuskan adanya kebijakan daerah tentang ekonomi lokal	Pengarusutamaan ekonomi Kreatif melalui Badan Ekonomi Kreatif	Berkembangnya ekonomi kreatif tanpa meninggalkan ekonomi kerakyatan	Sekretariat Daerah perlu mencari format ekonomi kreatif tanpan meninggalkan ekonomi kerakyatan yang tepat dan sesuai dengan sumber daya lokal

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

3	Perkembangan teknologi informasi yang memberikan kecepatan layanan data	Adanya kemudahan dalam akses dan pengambilan data yang terintegrasi	Perkembangan pelaksanaan kegiatan pada satu SKPD menjadi informasi bagi SKPD lainnya	Diharapkan dengan terwujudnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah akan memudahkan penyusunan program berikutnya sekaligus pelaporannya
---	---	---	--	---

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel **Tabel 4.1.1**, **Tabel 4.1.2** dan **Tabel 4.1.3** sebagai berikut:

Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah 2016-2017

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				2016	2017	2016	2017
1	TUJUAN :						
	Meningkatkan kemakmuran tempat ibadah sebagai aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase tempat ibadah aktif	Jumlah tempat ibadah aktif dibagi jumlah tempat ibadah seluruhnya x 100%	62%	70%	62%	75,38%
			Kriteria tempat ibadah aktif : 1. Digunakan untuk ibadah wajib secara rutin; 2. Digunakan untuk tempat pengajaran ilmu agama secara rutin; 3. Mempunyai kepengurusan yang terstruktur dan aktif.				
		Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Jumlah pengajar agama dibanding Jumlah penduduk Kriteria pengajar agama adalah guru agama formal dan non formal	1:86	1 : 85	1:86	1 : 87

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				2016	2017	2016	2017
	SASARAN :						
	Meningkatnya peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah	1. Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi	Jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi dibagi Jumlah Tempat Ibadah yang ada x 100%	5%	10%	4%	5%
		2. Persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	Jumlah pengajar agama yang terfasilitasi dibagi jumlah pengajar agama x 100%	85%	90%	85%	90%
2	TUJUAN :						
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	Nilai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah Kota Blitar	B	B	BB	BB
		Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)	Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				2016	2017	2016	2017
	SASARAN :						
	1. Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang tidak dibatalkan dibagi Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya x 100 %	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan	1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rumusan kebijakan pemerintahan Umum yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%	100%	100%	100%

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				2016	2017	2016	2017
		3. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%	100%	100%	100%
		4. Nilai SAKIP Setda	LHE SAKIP SETDA dari Inspektorat Kota Blitar	B	B	B	BB
	3. Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	Jumlah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement dibagi Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan melalui SIRUP x 100 %	90%	90%	96,69%	88,52%
	4. Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	Hasil survey kepuasan masyarakat SKPD dan instansi terkait terhadap pelayanan surat menyurat dan arsip	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				2016	2017	2016	2017
	keuangan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta kehumasan dan keprotokolan	2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan administrasi keuangan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumahtanggaan	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH) terhadap layanan kerumah tanggaan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kehumasan dan keprotokolan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah 2018

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2018
1	TUJUAN :			
	Meningkatkan kemakmuran tempat ibadah	Persentase tempat ibadah aktif	Jumlah tempat ibadah aktif / jumlah tempat ibadah seluruhnya x 100%	78%
		Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Kriteria tempat ibadah aktif : 1. Digunakan untuk ibadah wajib secara rutin; 2. Digunakan untuk tempat pengajaran ilmu agama secara rutin; 3. Mempunyai kepengurusan yang terstruktur dan aktif. Jumlah pengajar agama : Jumlah penduduk Kriteria pengajar agama adalah guru agama formal dan non formal	1 : 84
	SASARAN :			
	Meningkatnya peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah	1. Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi	Jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi / Jumlah Tempat Ibadah yang ada x 100%	26%
		2. Persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	Jumlah pengajar agama yang terfasilitasi/jumlah pengajar agama x 100%	95%
2	TUJUAN :			
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	Nilai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah Kota Blitar	BB
		Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)	Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD)	Sangat Tinggi

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2018
	SASARAN :			
	1. Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang tidak dibatalkan dibagi Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya x 100 %	100%
	2. Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan	1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rumusan kebijakan pemerintahan Umum yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%
		2. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%
		3. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%
		4. Nilai SAKIP Setda	LHE SAKIP SETDA dari Inspektorat Kota Blitar	B

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2018
	3. Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	Jumlah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement dibagi Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan melalui SIRUP x 100 %	91%
	4. Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta kehumasan dan keprotokolan	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	Hasil survey kepuasan masyarakat SKPD dan instansi terkait terhadap pelayanan surat menyurat dan arsip	BAIK
		2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur	BAIK
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan administrasi keuangan	BAIK
		4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumahtanggaan	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH) terhadap layanan kerumah tanggaan	BAIK
		5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kehumasan dan keprotokolan	BAIK

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Tabel 4.1.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah 2019 – 2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2019	2020	2021
1	TUJUAN :					
	Meningkatkan kemakmuran tempat ibadah	Persentase tempat ibadah aktif	Jumlah tempat ibadah aktif dibagi jumlah tempat ibadah seluruhnya x 100% Kriteria tempat ibadah aktif : 1. Digunakan untuk ibadah wajib secara rutin; 2. Digunakan untuk tempat pengajaran ilmu agama secara rutin; 3. Mempunyai kepengurusan yang terstruktur dan aktif.	83%	92%	100%
		Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Jumlah pengajar agama dibanding Jumlah penduduk Kriteria pengajar agama adalah guru agama formal dan non formal	1 : 83	1 : 82	1 : 80
	SASARAN :					
	Meningkatnya peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah	Persentase peningkatan tempat ibadah yang representatif	Jumlah tempat ibadah yang representatif tahun n dikurangi Jumlah tempat ibadah yang representatif tahun n-1 / Jumlah tempat ibadah yang representatif tahun n-1 x 100%	1%	1%	1%

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2019	2020	2021
2	TUJUAN :					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)</p> <p>Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)</p>	<p>Nilai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah Kota Blitar</p> <p>Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD)</p>	BB	BB	A
				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	SASARAN :					
	1. Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan	<p>Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang tidak dibatalkan dibagi</p> <p>Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya x 100 %</p>	100%	100%	100%

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2019	2020	2021
	2. Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan	1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rumusan kebijakan pemerintahan Umum yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%	100%	100%
		2. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%	100%	100%
		3. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%	100%	100%
		4. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%	100%	100%
		5. Nilai SAKIP Setda	LHE SAKIP SETDA dari Inspektorat Kota Blitar	B	B	B

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2019	2020	2021
	3. Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	Jumlah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement dibagi Jumlah Pengadaan Barang dibagi Jasa yang diumumkan melalui SIRUP x 100 %	92%	93%	94%
	4. Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta kehumasan dan keprotokolan	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH, OPD dan instansi terkait terhadap pelayanan surat menyurat dan arsip)	BAIK	BAIK	BAIK
		2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur	BAIK	BAIK	BAIK
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan administrasi keuangan	BAIK	BAIK	BAIK
		4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumahtanggaan	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan kerumah tanggaan	BAIK	BAIK	BAIK
		5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kehumasan dan keprotokolan	BAIK	BAIK	BAIK

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah adalah strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat daerah menunjukkan bagaimana cara Sekretariat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Sekretariat daerah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Sekretariat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Blitar sebagaimana tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sekretariat Daerah

VISI : MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021			
MISI : 1. MENINGKATKAN AKTUALISASI NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatkan kemakmuran tempat ibadah sebagai aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat	1 Meningkatnya peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah	1 Mewujudkan Tempat Ibadah yang representatif bagi pemeluknya	1 Peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan terhadap pengajar agama
MISI : 6. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN PROFESIONAL			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1 Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Melaksanakan penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum 2 Melaksanakan regulasi pembentukan organisasi tata kerja OPD	1 Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 2 Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya 3 Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan hukum dan HAM 1 Peningkatan pelaksanaan evaluasi, analisis kepegawaian (analisa jabatan, analisa beban kerja, standar kompetensi jabatan) OPD sesuai peraturan perundang-undangan

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2 Meningkatkan tertib administrasi Pemerintahan	1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah	1 Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
		2 Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima	1 Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
		3 Mendorong Kecamatan untuk meningkatkan tertib administrasi Kecamatan dan Kelurahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui monitoring rutin	1 Fasilitasi, sosialisasi, supervisi, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM Kecamatan dan Kelurahan
		4 Mendorong lembaga kemasyarakatan untuk selalu berpartisipasi aktif dalam setiap program Pemerintah Daerah	1 Fasilitasi, komunikasi, dan koordinasi serta pembinaan rutin terhadap seluruh lembaga kemasyarakatan mitra pemerintah
		5 Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan	1 Peningkatan pembinaan secara berkelanjutan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		6 Meningkatkan Fungsi Koordinasi, konsultasi dan Fasilitasi serta Perumusan Kebijakan di bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan	1 Peningkatan pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat
		7 Mengkoordinasikan arah kebijakan promosi ekonomi bersama SKPD terkait	1 Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kreatif
		8 Menerapkan tata kelola BUMD yang baik	1 Optimalisasi pengelolaan BUMD
		9 Meningkatkan profesionalisme birokrat	1 Optimalisasi pengelolaan DBHCHT
		10 Meningkatkan kualitas monitoring, pelaporan dan pembinaan administrasi pembangunan secara berkala	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala
	3 Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1 Meningkatkan kualitas layanan pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan	1 Perumusan kebijakan penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	4 Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta keprotokolan	1 Meningkatkan kualitas administrasi ketatausahaan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	1 Peningkatan tertib administrasi ketatausahaan yang didukung oleh sistem manajemen surat, dan arsip yang baik
			2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang layak dan representatif

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3 Peningkatan pengelolaan sistem administrasi keuangan Setda yang efektif , efisien transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pedoman dan kaedah yang berlaku
			4 Peningkatan jenis, macam dan mutu pelayanan KDH/WKDH dan tamu daerah
		2 Monitoring Media dan Media Handling Assesment	1 Peningkatan Pengelolaan berita daerah Berbasis Media Planning
		3 Penerapan Standar dan Sosialisasi Keprotokolan	1 Peningkatan Penerapan prinsip dan asas keprotokolan disesuaikan dengan konteks lokal

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang pro rakyat yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJM Kota Blitar 2016-2021, masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah Kota Blitar membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah. Dan untuk melihat uraian target indikator kinerja program dan kegiatan dapat dilihat dalam matrik program dan kegiatan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 diuraikan dalam tabel-tabel sebagai berikut:

1. Tabel 6.1.1 memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah pada tahun 2016
2. Tabel 6.1.2 memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah pada tahun 2017
3. Tabel 6.1.3 memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah pada tahun 2018
4. Tabel 6.1.4 memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah pada tahun 2019 - 2021

Tabel 6.1.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
									2016		2016							
									Target	Rp.	Target	Rp.						
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja instansi pemerintahan	Nilai LPPD yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	1	20	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	100 %	230.677.379	100 %	230.677.379	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR				
						1	20	16	07	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jenis dokumen yang tersusun	3 jenis	3 jenis	131.103.640	3 jenis	131.103.640		
						1	20	16	09	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun	Jenis dokumen yang tersusun	3 jenis	3 jenis	79.495.100	3 jenis	79.495.100		
						1	20	16	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah	Jumlah fasilitasi tugas pimpinan daerah	-	3 kegiatan	20.078.639	3 kegiatan	20.078.639		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2016		2016			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Meningkatnya efektifitas sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Blitar	Persentase tanah milik Pemkot Blitar yang bersertifikat	1	20	16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase tanah asset bersertifikat	89 %	95 %	276.140.693	95 %	276.140.693	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR	
			1	20	16	01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya Sertifikasi dan Pembayaran PBB Tanah aset Pemerintah Kota Blitar	N/A	19 bidang	276.140.693	19 bidang	276.140.693		
Mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang antara pemerintah kota, provinsi dan luar negeri	Terwujudnya kerjasama atardaerah dan luar negeri	Persentase kesepakatan bersama kerjasama daerah dalam negeri dan luar negeri yang ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama	1	20	25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan jumlah kerjasama antar Pemerintah Daerah	65 %	87 %	242.718.150	87 %	203.743.400	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR	
			1	20	25	01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Jumlah pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain	4 jenis	3 jenis	69.149.050	3 jenis	30.174.300		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2016		2016			
									Target	Rp.	Target	Rp.		
			1	20	25	05	Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI	Jumlah Pelaksanaan Rakernas dan Muskomwil APEKSI	2 kegiatan	3 kegiatan	173.569.100	173.569.100		
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Otonomi Daerah, pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga kemasyarakatan kelurahan	Persentase Lembaga yang memperoleh fasilitasi Asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas Otonomi Daerah	1	20	32		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	Persentase lembaga yang memperoleh asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan	60 %	60 %	538.971.035	471.294.635	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR
			1	20	32	01	Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah	Terlaksananya koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas otoda	4 kali	4 kali	218.250.485	213.236.985		
							Fasilitasi HUT Provinsi Jawa Timur		1 kegiatan	1 kegiatan				

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
									2016		2016							
									Target	Rp.	Target	Rp.						
		Persentase Perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang mendapatkan pembinaan	1	20	32	02	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pembinaan perangkat Kecamatan	3	kecamatan	3	kecamatan	1.16.218.550	3	kecamatan	53.555.650		
							Kelurahan			21	kelurahan		21	kelurahan				
		Persentase lembaga kemasyarakatan (RT, RW, LPMK) yang aktif	1	20	32	03	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah	Jumlah peserta pelaksanaan peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan	N/A		798	Orang	204.502.000	798	Orang	204.502.000		
			1	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	80	%	80	%	30.158.900	80	%	30.158.900	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR
			1	20	01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jaringan internet di Bagian Tata Pemerintahan	12	bulan	12	bulan	3.372.000	12	bulan	3.372.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	26 jenis	46 jenis	8.353.700	46 jenis	8.353.700		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	7 jenis	6 jenis	10.502.650	6 jenis	10.502.650		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	11 jenis	5 jenis	2.215.550	5 jenis	2.215.550		
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar Nasional dan Regional yang disediakan	12 bulan	12 bulan	3.840.000	12 bulan	3.840.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2016		2016			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Frekwensi penyediaan makanan dan minuman rapat	12 kali	3 kali	1.875.000	3 kali	1.875.000		
			1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	80 %	100 %	26.369.000	100 %	26.369.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	3 jenis	3 jenis	23.369.000	3 jenis	23.369.000		
			1	20	02	10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair Kantor	2 jenis	0 jenis	0	0 jenis	0		
			1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	3 jenis	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.000.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2016		2016			
									Target	Rp.	Target	Rp.		
			1	20	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	80 %	97 %	44.100.000	44.100.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR	
			1	20	05	11	Fasilitasi keberansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah penyertaan pada penyelenggaraan event-event daerah	4 kali	5 kali	38.100.000	38.100.000		
			1	20	05	12	Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	Terlaksananya publikasi kegiatan Bagian Tata Pemerintahan	1 kali	1 kali	6.000.000	6.000.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
Mewujudkan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan daerah	1	20	26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undang	100 %	100 %	1.146.757.471	100 %	1.146.757.471	BAGIAN HUKUM	KOTA BLITAR	
			1	20	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Rancangan peraturan perundang-undangan yang tersusun	N/A	4 kegiatan	79.044.811	4 kegiatan	79.044.811		
			1	20	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya sosialisasi peraturan perundang-undangan	N/A	7 kali	96.407.200	7 kali	96.407.200		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2016		2016					
									Target	Rp.	Target	Rp.				
Mewujudkan Ketersediaan informasi atas peraturan perundang-undangan daerah serta masyarakat sadar hukum	Terwujudnya Ketersediaan informasi atas peraturan perundang-undangan daerah serta masyarakat sadar hukum	Presentase Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	1	20	05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya Dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan	N/A	4	maca m himpu nan	337.214.150	4	maca m himpu nan	337.214.150		
			1	20	06	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Tersedianya kajian	N/A	4	kali kajian	143.202.800	4	kali kajian	143.202.800		
Mewujudkan Bantuan Hukum Kedinasan untuk ASN	Terwujudnya Bantuan Hukum Kedinasan untuk ASN	Presentase Bantuan Hukum Kedinasan untuk ASN	1	20	07	Fasilitasi bantuan hukum kedinasan	Tersedianya bantuan hukum	N/A	7	kali bantu an huku m	301.217.200	7	kali bantu an huku m	301.217.200		
			1	20	08	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan	N/A	28	kali penyul uhan	119.302.200	28	kali penyul uhan	119.302.200		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	26	09	Penyusunan Rencana Kerja Surat Keputusan Walikota	Tercapainya penyusunan SK Walikota	N/A	570 SK	1.1.657.900	570 SK	1.1.657.900		
			1	20	26	10	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah	Tercapainya peningkatan penyusunan raperda	N/A	4 buah	47.466.910	4 buah	47.466.910		
			1	20	26	11	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Walikota	Jumlah Raperwali yang tersusun	N/A	88 perwali	11.244.300	88 perwali	11.244.300		
			1	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	N/A	52 %	34.260.500	52 %	34.260.500	BAGIAN HUKUM	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya service komputer dan printer	N/A	36 kali	9.648.000	36 kali	9.648.000		
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	N/A	32 jenis	5.390.700	32 jenis	5.390.700		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan fotokopi	N/A	5 jenis	11.277.000	5 jenis	11.277.000		
			1	20	01	17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	N/A	10 jenis	1.294.800	10 jenis	1.294.800		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	01	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah dan buku literatur	N/A	12 bulan	5.040.000	12 bulan	5.040.000		
			1	20	01		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya snack dan minuman	N/A	4 jenis	1.610.000	4 jenis	1.610.000		
			1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	60 %	49.939.300	60 %	49.775.000	BAGIAN HUKUM	KOTA BLITAR
			1	20	02		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya komputer dan kelengkapannya	N/A	4 jenis	30.575.000	4 jenis	30.425.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2016		2016			
									Target	Rp.	Target	Rp.		
			1	20	02	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meja komputer	N/A	2 unit	19.364.300	2 unit	19.350.000		
Meningkatnya kemakmuran dan tempat ibadah	Mewujudkan kerukunan dan harmoni antar umat beragama dan kesadaran beragama masyarakat	1. Persentase tempat ibadah yang aktif	1	20	17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kasus kerusuhan bernuansa SARA	0 kasus	0 kasus	1.125.863.410	0 kasus	1.151.613.410	BAGIAN KESEJAH TERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
		2. Persentase ketersediaan jumlah pengajar agama aktif	1	20	17	01	Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Terjadinya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama yang semakin kondusif, melalui kegiatan isroj mi'roj, Maulud Nabi, Idul Adha, Safari Ramadhan, Buka Puasa Ramadhan bersama Walikota dengan Ulama, Gema Takbir, Tahun Baru Hijriyah, Peringatan HSN dan Fasilitas MTQ Tk. Kota	N/A	11 kegiatan	1.125.863.410	11 kegiatan	1.151.613.410		
Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi kesejahteraan rakyat	Terwujudnya pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat	1. Persentase rumusan kebijakan di bidang keagamaan	1	20	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	N/A	11 bulan	65.708.600	11 bulan	65.708.600	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercukupinya jasa/sewa internet speedy setiap bulan	N/A	11 bulan	5.013.600	11 bulan	5.013.600		
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya paket alat tulis kantor	N/A	54 jenis	16.750.000	54 jenis	16.750.000		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	N/A	6 jenis	17.100.000	6 jenis	17.100.000		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	N/A	12 jenis	1.800.000	12 jenis	1.800.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber informasi bagi karyawan sebanyak 2 jenis	N/A	12 bulan	5.520.000	12 bulan	5.520.000		
			1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya paket makan minum rapat/kegiatan dan tamu sebanyak 4 jenis	N/A	9 bulan	19.525.000	9 bulan	19.525.000		
			1	20	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	N/A	88 %	9.719.000	88 %	9.719.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	06	05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Tersusunnya dokumen kerja rencana kegiatan dan anggaran, meliputi: SKP, SOP, PRKA 2016, DPPA 2016, RKA 2017/DPA 2017 Bagian Kesra Setda Kota Blitar	N/A	6 dokumen	9.719.000	6 dokumen	9.719.000		
			1	20	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	N/A	96 %	56.700.000	96 %	56.700.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR
			1	20	05	11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan sekaligus terbukanya akses serta pengetahuan masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial di Kota Blitar	N/A	5 kegiatan	44.700.000	5 kegiatan	44.700.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	05	12	Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	Terinformasikannya pelaksanaan program/kegiatan selama satu tahun anggaran melalui pemuatan berita di media cetak	N/A	2 kali	12.000.000	2 kali	12.000.000		
			1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	N/A	80 %	17.570.000	80 %	17.570.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan sebanyak 3 jenis	N/A	3 jenis	11.270.000	3 jenis	11.270.000		
			1	20	03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan gedung kantor	N/A	4 jenis	6.300.000	4 jenis	6.300.000		
			1	20	22		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	N/A	100 %	89.739.400	100 %	86.048.990	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	22	09	Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi program raskin bersama instansi terkait melalui fasilitasi pemberian subsidi (penggantian harga tebus raskin) program raskin pusat, sosialisasi dan monev, serta rakor kegiatan	N/A	2 kegiatan	89.739.400	2 kegiatan	86.048.990		
		2. Persentase rumusan kebijakan di bidang pendidikan													
		3. Persentase rumusan kebijakan di bidang kebudayaan													
		4. Persentase rumusan kebijakan di bidang kesehatan													

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2016			
							Target	Rp.	Target	Rp.		
		5. Persentase rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat										
		6. Persentase permohonan hibah dan bansos yang dapat ditindaklanjuti										
		7. Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang sosial dalam daerah dan luar daerah										
		8. Persentase rumusan kebijakan bidang sosial kemasyarakatan										

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2016		2016					
									Target	Rp.	Target	Rp.				
Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui sinergi antar lembaga dan keterpaduan unsur penerapan ekonomi kreatif	Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sinergi antar lembaga (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) dan keterpaduan unsur-unsur (subsektor) ekonomi kreatif	Meningkatnya Peran dan Fungsi TPID	1	20	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan bidang ekonomi	N/A	92	%	230.776.000	92	%	BAGIAN PEREKONOMIAN	KOTA BLITAR	
		Persentase rumusan kebijakan / rekomendasi pelaksanaan pameran promosi	1	20	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Laporan Perencanaan pembangunan Bidang ekonomi	N/A	4	Dokumen	92.115.500	4	Dokumen	92.115.500	
		Terbinanya BUMD	1	20	22		Fasilitasi Pengembangan BUMD	Laporan pengembangan BUMD Kota Blitar	N/A	2	Dokumen	84.053.000	2	Dokumen	84.053.000	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	22	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	website ekonomi kreatif kota blitar dan buku potensi ekonomi kreatif kota blitar	N/A	4 Buku	54.607.500	4 Buku	54.607.500			
			1	20	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	N/A	12 Bulan	38.863.550	12 Bulan	38.863.550	BAGIAN PEREKONOMIAN	KOTA BLITAR	
			1	20	01	02	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah pemeliharaan perawatan kerja	N/A	5 jenis	5.016.500	5 jenis	5.016.500		
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	N/A	40 jenis	13.714.800	40 jenis	13.714.800		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	N/A	3 jenis	6.161.000	3 jenis	6.161.000		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	N/A	15 jenis	3.194.250	15 jenis	3.194.250		
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	N/A	3 jenis	3.480.000	3 jenis	3.480.000		
			1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman	N/A	12 bulan	7.297.000	12 bulan	7.297.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2016		2016			
									Target	Rp.	Target	Rp.		
			1	20	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	N/A	88 %	8.415.000	88 %	8.415.000	BAGIAN PEREKONOMIAN	KOTA BLITAR
			1	20	05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	RKA, DPA, DPPA, SOP, Laporan Akhir Tahun CALK	N/A	5 Dokumen	8.415.000	5 Dokumen	8.415.000		
			1	20	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	N/A	99 %	48.153.000	99 %	48.153.000	BAGIAN PEREKONOMIAN	KOTA BLITAR
			1	20	05	Fasilitasi keberansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah kepesertaan pada even daerah dan hari besar nasional	4 even	5 even	48.153.000	5 even	48.153.000		
			1	20	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	N/A	86 %	7.213.248	86 %	7.213.248	BAGIAN PEREKONOMIAN	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	N/A	5 Jenis	7.213.248	5 Jenis	7.213.248		
			1	20	15		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase kenaikan realisasi PMDN	N/A	98 %	61.137.000	98 %	61.137.000	BAGIAN PEREKONOMIAN	KOTA BLITAR
			1	20	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Publikasi dan promosi potensi investasi daerah	N/A	12 kali	61.137.000	12 kali	61.137.000		
		Presentase penyerapan anggaran DBHCHT Kota Blitar	1	20	33		PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Persentase pelanggaran cukai rokok	N/A	98 %	244.203.476	98 %	244.203.476	BAGIAN PEREKONOMIAN	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	33	01	Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai	Penyampaian ketentuan dibidang cukai	N/A	300 peserta	244.203.476	300 peserta	244.203.476		
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pembangunan	Meningkatkan tertib administrasi pembangunan	Persentase SKPD yang pelaksanaan penyerapan APBD sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1	20	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Persentase ketersediaan data statistik daerah	99 %	99 %	19.925.000	99 %	19.750.000	BAGIAN ADMINIS TRASI PEMBANGUNAN	KOTA BLITAR
			1	20	15	07	Pendokumentasian Proses Pembangunan Daerah	Dokumentasi proses pembangunan di Kota Blitar	50 %	65 Buku	19.925.000	65 Buku	19.750.000		
			1	20	21		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase SKPD yang Kualitas Perencanaannya Baik	N/A	73 %	496.772.436	73 %	493.995.436	BAGIAN ADMINIS TRASI PEMBANGUNAN	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	21	13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Laporan Monitoring evaluasi pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penghargaan SKPD berprestasi	N/A	4 Laporan	496.772.436	4 Laporan	493.995.436		
										12 penghargaan		12 penghargaan			
		Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang administrasi pembangunan	1	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	100 %	100 %	53.918.300	100 %	44.533.300	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KOTA BLITAR
			1	20	01		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	1 paket	4 paket	8.896.000	4 paket	8.896.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya paket alat tulis kantor 4 paket	2 paket	4 paket	16.335.800	4 paket	16.335.800		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	4 paket	6.250.000	4 paket	6.250.000		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	N/A	1 paket	4.609.000	1 paket	4.609.000		
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	4 paket	3.840.000	4 paket	2.880.000		
			1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	4 paket	13.987.500	4 paket	5.562.500		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2016		2016			
									Target	Rp.	Target	Rp.		
			1	20	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90 %	98 %	34.477.860	34.302.860	BAGIAN ADMINIS TRASI PEMBANGUNAN	KOTA BLITAR	
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran kedinasan 2 Paket	2 paket	2 paket	34.477.860	34.302.860		
			1	20	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	100 %	93 %	109.169.200	109.169.200	BAGIAN ADMINIS TRASI PEMBANGUNAN	KOTA BLITAR	
			1	20	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Perwali	1 Perwali	94.799.200	94.799.200		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	05	11	Fasilitasi keberansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Fasilitasi Keberansertaan pada event Daerah dan hari besar nasional	6 event	5 event	14.370.000	5 event	14.370.000		
		nilai SAKIP SETDA	1	20	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	100 %	100 %	21.947.500	100 %	20.322.500	BAGIAN ADMINIS TRASI PEMBANGUNAN	KOTA BLITAR
			1	20	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip,LKPJ,LPPD, CALK	3 dokumen	4 dokumen	5.337.500	4 dokumen	5.337.500		
			1	20	06	05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Dokumen renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA, Renstra, SOP	4 dokumen	7 dokumen	16.610.000	7 dokumen	14.985.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2016		2016			
									Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	1	20	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	80 %	80 %	265.073.630	265.073.630	BAGIAN LAYANAN PENGAD AAN	KOTA BLITAR	
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	28 Jenis	28 Jenis	30.712.900	30.712.900		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	138.218.000	138.218.000		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0 jenis	6 jenis	14.563.800	14.563.800		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Penunjang Administrasi Perkantoran	2 jenis	3 jenis	3.480.000	3 jenis	3.480.000		
			1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minum Rapat/Kegiatan	16 kali	12 kali	3.900.000	12 kali	3.900.000		
			1	20	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi ke dalam dan Luar Daerah	- kali	8 kali	74.198.930	8 kali	74.198.930		
			1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	165.204.845	100 %	165.204.845	BAGIAN LAYANAN PENGAD AAN	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penunjang Administrasi Perkantoran	3 jenis	11 jenis	154.334.845	11 jenis	154.334.845		
			1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah (jenis) pemeliharaan peralatan gedung kantor bagi kelancaran kedinasan	4 jenis	4 jenis	10.870.000	4 jenis	10.870.000		
			1	20	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh peningkatan kapasitas	100 %	100 %	20.540.000	100 %	20.540.000	BAGIAN LAYANAN PENGAD AAN	KOTA BLITAR
			1	20	05	11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah event daerah & HBN yang diikuti	5 kegiatan	5 kegiatan	14.450.000	5 kegiatan	14.450.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2016		2016			
									Target	Rp.	Target	Rp.		
			1	20	05	12	Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	Jumlah informasi program/kegiatan	1 kali	1 kali	6.090.000	6.090.000		
			1	20	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran	100 %	100 %	10.727.000	10.727.000	BAGIAN LAYANAN PENGAD AAN	KOTA BLITAR
			1	20	06	05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jenis Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	6 jenis	6 jenis	10.727.000	10.727.000		
			1	20	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Kapasitas Fiskal		1,72 WTP	401.700.825	401.700.825	BAGIAN LAYANAN PENGAD AAN	KOTA BLITAR
			1	20	17	40	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	85 Paket	117 Paket	271.570.500	271.570.500		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	17	60	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis	250 Orang	250 Orang	130.130.325	250 Orang	130.130.325		
								Jumlah Forum Pengadaan yang dibentuk	- Forum	1 Forum		1 Forum			
								Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan Kapasitas	- Orang	32 Orang		32 Orang			
Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip dan sandi, administrasi keuangan, kerumah tanggaan serta sarana dan prasarana	Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip dan sandi, administrasi keuangan, kerumah tanggaan serta sarana dan prasarana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat menyurat, arsip dan sandi	1	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor		1 : 12	4.865.007.917	1 : 12	4.865.007.917	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Via Pos		3 jenis	3.125.000	3 jenis	3.125.000		
			1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik, air dan jaringan FO		4 jenis	857.437.470	4 jenis	857.437.470		
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor		45 jenis	46.425.950	45 jenis	46.425.950		
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tercukupinya formulir/barang cetakan dan dokumen hasil penggandaan		49 jenis	101.095.950	49 jenis	101.095.950		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik		36 jenis	95.454.150	36 jenis	95.454.150		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		7 Jenis	116.158.450	7 Jenis	116.158.450		
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan		2 jenis	32.760.000	2 jenis	32.760.000		
			1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Fasilitasi jalan sehat		12 kali	1.156.472.400	12 kali	1.156.472.400		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2016		2016			
									Target	Rp.	Target	Rp.		
						Fasilitasi halal bihalal		3 kali		3 kali				
						Fasilitasi konsumsi sekda		12 bulan		12 bulan				
			1	20	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		3 kali	1.413.025.067	3 kali	1.413.025.067		
			1	20	01	19	Penyediaan Jasa Perkantoran		40 Orang	1.026.566.240	40 Orang	1.026.566.240		
			1	20	01	20	Pengelolaan Sistem Surat Menyurat dan Sandi		3 kegiatan	16.487.240	3 kegiatan	16.487.240		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2016		2016			
									Target	Rp.	Target	Rp.		
			1	20	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Rasio aparatur memperoleh fasilitas		1:1	37.320.000	1:1	37.320.000	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR
			1	20	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercukupinya Pakaian Dinas dan perlengkapannya		5 Jenis	37.320.000	5 Jenis	37.320.000		
			1	20	24	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan jumlah kerjasama antar pemerintah daerah		1:1	89.500.000	1:1	89.500.000	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR
			1	20	24	Fasilitasi kunjungan kerja antar Pemerintah Daerah	Jumlah cindera mata		3 Jenis	89.500.000	3 Jenis	89.500.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2016		2016			
									Target	Rp.	Target	Rp.		
			1	20	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas		1:1	119.250.000	1:1	119.250.000	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR
			1	20	05		Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas		1:12		1:12			
			1	20	05	11	Fasilitasi keberansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Terlaksananya keberansertaan pada event Daerah dan Hari Besar Nasional	4 Jenis	113.250.000	4 Jenis	113.250.000		
			1	20	05	12	Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	Terselenggaranya penyebarluasan informasi SKPD	1 Jenis	6.000.000	1 Jenis	6.000.000		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penatausahaan keuangan	1	20	18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN	Persentase Regulasi Bidang Keuangan yang dievaluasi		1:1	51.568.953	1:1	51.568.953	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	18	06	Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan		8 Jenis	51.568.953	8 Jenis	51.568.953		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) administrasi kerumah tanggaan	1	20	16		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase regulasi bidang keuangan yang dievaluasi		1:1	4.608.786.641	1:1	4.608.786.641	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR
			1	20	16	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH		2 Jenis	4.608.786.641	2 Jenis	4.608.786.641		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan sarana dan prasarana	1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		1:5	3.191.282.634	1:5	3.191.282.634	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2016		2016			
										Target	Rp.	Target	Rp.		
							Meningkatnya sarana prasarana aparatur		1:5		1:5				
			1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		50 buah	201.909.800	50 buah	201.909.800			
							Bendera		150 buah		150 buah				
							Tiang bendera		100 lonjor		100 lonjor				
							AC		7 Unit		7 Unit				
							Tempat Tidur		1 Unit		1 Unit				

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor bagi kelancaran kedinasan		5 Unit	28.213.054	5 Unit	28.213.054		
			1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas		3 Jenis	574.777.400	3 Jenis	574.777.400		
			1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pengecatan gedung/kantor Walikota		3 Jenis	1.616.280.900	3 Jenis	1.616.280.900		
			1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas		7 Jenis	603.541.480	7 Jenis	603.541.480		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		4 Jenis	149.910.000	4 Jenis	149.910.000		
			1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor		5 Jenis	16.650.000	5 Jenis	16.650.000		
Meningkatkan kualitas layanan informasi kehumasan	Meningkatnya Informasi Positif Pemerintah Kota Blitar	Rasio Jumlah berita positif di media massa	1	20	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor		90 %	46.311.000	90 %	69.484.000	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR
			1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah tersedianya bahan dan Alat Tulis kantor		12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah tersedianya stopmap bagian, sambutan, lembar disposisi, amplop coklat dan fotocopi naskah dinas		12 bulan	2.740.000	12 bulan	27.400.000		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga		16 jenis	5.736.000	16 jenis	5.736.000		
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		12 bulan	17.835.000	12 bulan	16.348.000		
			1	20	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Persentase peningkatan penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi		80 %	60.815.200	80 %	60.815.200	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	15	03	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	jumlah rakor kehumasan yang diselenggarakan dalam satu tahun		4 jenis	60.815.200	4 jenis	60.815.200		
			1	20	18		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Persentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar		100 %	1.042.963.750	100 %	1.029.368.750	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR
			1	20	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	jumlah jumpa pers dan publikasi yang dapat difasilitasi melalui media TV, Radio, Media Cetak, dan media On Line, Fasilitasi Kegiatan Menyambut Tahun Baru		5 jenis	1.042.963.750	5 jenis	1.029.368.750		
			1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		75 %	123.765.563	75 %	123.765.563	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor		1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	40.000.000		
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah tersedianya peralatan gedung kantor		5 jenis	68.565.563	5 jenis	68.565.563		
			1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor		5 jenis	15.200.000	5 jenis	15.200.000		
			1	20	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Persentase ketersediaan data statistik daerah		91 %	206.673.000	91 %	182.532.000	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	15	07	Pendokumentasian Proses Pembangunan Daerah	jumlah dokumentasi kegiatan yang dapat difasilitasi dalam bentuk foto dan video, spanduk, baliho, joglo, dan leaflet		8 jenis	206.673.000	8 jenis	182.532.000		
			1	20	31		PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan		80 %	173.450.000	80 %	168.700.000	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR
			1	20	31	01	Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai	jumlah publikasi yang dapat difasilitasi melalui media Tv, radio, media cetak, media on line, spanduk dan baliho		6 jenis	173.450.000	6 jenis	168.700.000		
Meningkatkan kualitas layanan tata upacara, tata penghormatan, dan tata tempat	Meningkatnya kualitas tertib acara keprotokolan	Acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	1	20	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas		70 %	77.640.200	70 %	77.640.200	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	05	06	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi untuk penyelenggaraan bimtek keprotokolan		1 kali	53.145.200	1 kali	53.145.200		
			1	20	05	11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi dalam peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Blitar		5 jenis	24.495.000	5 jenis	24.495.000		
			1	20	24		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		%	90.668.500	%	90.668.500	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR
			1	20	24	06	Fasilitasi kunjungan kerja antar Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi dalam penerimaan tamu tamu daerah		26 kegiatan	90.668.500	26 kegiatan	90.668.500		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2016		2016			
									Target	Rp.	Target	Rp.		
			1	20	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terciptanya peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah		%	1.878.270.317	%	1.740.210.317	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR
			1	20	16	02 Penataan Acara Kedinasan Pemerintah Daerah	jumlah upacara yang dapat difasilitasi dalam satu tahun, fasilitasi HUT RI, Fasilitasi Hari Jadi Kota Blitar, Fasilitasi Kegiatan Menyambut Tahun Baru		4 paket	1.878.270.317	4 paket	1.740.210.317		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya nilai SAKIP Kota	1	20	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor		77 %	32.722.650	77 %	32.722.650	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KOTA BLITAR
			1	20	01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase alat tulis kantor yang tersedia		100 %	11.967.500	100 %	11.967.500		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		5 jenis	9.971.950	5 jenis	9.971.950		
			1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		5 jenis/tribulan	2.940.200	5 jenis/tribulan	2.940.200		
			1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		3 jenis/bulan	4.440.000	3 jenis/bulan	4.440.000		
			1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	pesentase penyediaan makan dan minuman rapat dan tamu		77 %	3.403.000	77 %	3.403.000		
			1	20	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun		100 %	194.257.808	100 %	194.257.808	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2016		2016			
									Target	Rp.	Target	Rp.		
			1	20	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan penetapan kinerja yang tersusun		2 jenis	194.257.808	2 jenis	194.257.808		
	Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Tingkat Ketepatan struktur dan ukuran organisasi	1	20	30	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran		27 SKPD	375.961.743	27 SKPD	375.961.743	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KOTA BLITAR
			1	20	30	04	Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Jumlah kajian kelembagaan dan ketatalaksanaan	2 kajian	99.130.000	2 kajian	99.130.000		
			1	20	30	05	Fasilitasi Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi kelembagaannya	3 SKPD	136.411.418	3 SKPD	136.411.418		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	30	06	Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan standar ketatalaksanaan		45 SKPD	112.160.525	45 SKPD	112.160.525		
			1	20	30	25	Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumen road map reformasi birokrasi Kota Blitar		62 %	28.259.800	62 %	28.259.800		
			1	20	28		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan		85 %	113.783.500	85 %	113.783.500	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KOTA BLITAR
			1	20	28	06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah SKPD yang telah disusun analisis jabatannya		47 SKPD	7.963.500	47 SKPD	7.963.500		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	28	20	Penyusunan Kompetensi Jabatan PNS	Jumlah SKPD yang telah disusun kompetensi jabatan manjerialnya		3 SKPD	51.265.000	3 SKPD	51.265.000		
			1	20	28	22	Penyusunan Analisa Beban Kerja PNS	Jumlah SKPD yang telah disusun analisa beban kerja		48 SKPD	4.015.000	48 SKPD	4.015.000		
			1	20	28	24	Penyusunan Evaluasi Jabatan PNS	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi jabatan PNS		3 SKPD	50.540.000	3 SKPD	50.540.000		
	Meningkatnya standar pelayanan di SKPD/Unit kerja	Jumlah SKPD yang melaksanakan standar pelayanan	1	20	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas		83 %	101.271.566	83 %	101.271.566	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	05	11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti		4 kegiatan	14.340.000	4 kegiatan	14.340.000		
			1	20	27	09	Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur	Jumlah SKPD yang memiliki KBK		20 SKPD	80.931.566	20 SKPD	80.931.566		
			1	20	05	12	Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan yang dilaksanakan		1 kali	6.000.000	1 kali	6.000.000		
			1	20	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		99 %	19.414.638	99 %	19.414.638	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2016		2016				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia		3 jenis	15.816.138	3 jenis	15.816.138		
			1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan peralatan kantor		100 %	3.598.500	100 %	3.598.500		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata -rata IKM	1	20	29		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Persentase SKPD melaksanakan IKM		100 %	56.385.023	100 %	56.385.023	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KOTA BLITAR
			1	20	29	04	Fasilitasi pengurusan Sertifikasi ISO	Jumlah SKPD yang telah disertifikasi ISO		1 SKPD	56.385.023	1 SKPD	56.385.023		

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Tabel 6.1.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2017

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.			
Meningkatkan kemakmuran tempat ibadah	Meningkatnya peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah	1. Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi	4	01	25	PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN	Jumlah Proposal tempat ibadah yang dianalisis dan memenuhi kriteria untuk diajukan rekomendasi	N/A	20 Proposal	2.196.000.000	23 Proposal	2.086.862.800	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA KOTA BLITAR	
		2. Persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	4	01	25	01	Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	11 kegiatan	9 Kegiatan	1.702.000.000	9 Kegiatan			1.686.105.300
			4	01	25	02	Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an	Jumlah dan jenis pembinaan yang dilakukan	1 kegiatan	10 Jenis	494.000.000	10 Jenis			400.757.500

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	4	01	25	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Peraturan Perundang-undangan daerah yang sesuai	100 %	100 %	336.899.200	100 %	326.757.517	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	KOTA KOTA BLITAR	
			4	01	25	02	Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah selain SK, Perwali dan Perda yang diterbitkan	4 kegiatan	10 buah	92.365.900	29 buah			92.062.450
			4	01	25	03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Rapat Koordinasi Legislasi yang dilaksanakan	N/A	15 Raperda	23.266.000	15 Raperda			20.354.300

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			4	01	25	06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap ppu yg baru, lebih tinggi dari keserasian antar ppu daerah	Jumlah Naskah Akademis Yang Dibuat	4 kali kajian	2 kali kajian	101.630.000	2 kajian	100.575.000		
			4	01	25	09	Penyusunan Surat Keputusan Walikota	Jumlah Keputusan Walikota yang diterbitkan	570 SK	750 buah	21.104.800	313 SK	20.058.550		
			4	01	25	10	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan	4 buah	10 buah	76.691.200	5 perda	72.443.917		
			4	01	25	11	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Jumlah Peraturan Walikota yang diterbitkan	88 perwali	60 buah	21.841.300	67 perwali	21.263.300		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											Target	Rp.			Target	Rp.
			4	01	28	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	85 %	77 %	100.454.300	72 %	94.341.407	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	KOTA BLITAR		
			4	01	28	06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N	47 SKPD	1387 jabatan	100.454.300	778 jabatan	94.341.407	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	KOTA BLITAR	
			4	01	30	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH)	Persentase SKPD/unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	27 SKPD	100 %	168.023.500	81 %	154.165.750	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	KOTA BLITAR		
			4	01	30	04	Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi	2 kajian	1 Kajian	52.769.000	1 Kajian	52.452.500	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	KOTA BLITAR	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
								Target	Rp.	Target	Rp.					
			4	01	07	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah kebijakan penyesuaian tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja	N/A	2	Kebijakan	68.761.500	2	Kebijakan	59.393.000		
			4	01	25	Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil revidi yang tersusun	62 %	1	Dokumen	46.493.000	1	Dokumen	42.320.250		
			4	01	33	PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	100 %	100 %		530.313.000	33 %		398.531.598	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	KOTA BLITAR
			4	01	33	01	Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan	Jumlah Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan	7 kali bantuan hukum	3 kali	530.313.000	1 kali		398.531.598		
			4	01	35	PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %		483.553.500	87 %		454.458.770	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
									Target	Rp.	Target	Rp.						
			4	01	35	01	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar	4	maca m himpun an	2	Jenis	209.506.000	2	Jenis	205.468.920		
			4	01	35	02	Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilaksanakan	28	kali penyul uhan	6	Kali	121.373.100	3	Kali	104.163.100		
			4	01	35	03	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	7	kali	6	kali	152.674.400	3	kali	144.826.750		
			4	01	39		PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR	Persentase jabatan yang telah memiliki Standar Kompetensi yang dihitung pada tahun ke N	77	%	77	%	66.310.500	78	%	65.268.566	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			4	01	39	01	Penyusunan evaluasi jabatan	Persentase jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun N	N/A	150 jabatan	55.002.900	83 jabatan	54.960.850		
			4	01	39	02	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial	Persentase jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke N	N/A	0 0	0		0		
			4	01	39	03	Penyusunan Analisa Beban Kerja	Persentase jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahun ke-N	48 SKPD	150 jabatan	0 11.307.60	270 jabatan	6 10.307.71		
	2. Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan	1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	4	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	100 %	100 %	285.056.300	100 %	272.903.448	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			4	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah SKPD yang menyusun LKj IP tepat waktu	N/A	29 OPD	285.056.300	29 OPD	272.903.448		
			4	01	15		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan	N/A	5,6 %	244.856.600	5 %	315.731.734	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR
			4	01	15	04	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Partisipasi lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi dan nasional, pencanangan BBGRM tk kota, propinsi dan nasional	N/A	3 kegiatan	175.193.400	3 kegiatan	167.528.297		
			4	01	15	05	Evaluasi Kelurahan Berhasil	Lomba kelurahan berhasil tingkat kota, dan propinsi	N/A	2 kali	69.663.200	2 kali	57.975.277		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
									Target	Rp.	Target	Rp.								
			4	01	15	15	Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Refreshing teknis dan entry/Updating data profil kelurahan	21	Kelurahan	21	Kelurahan	93.866.200	21	Kelurahan	90.228.160				
			4	01	16		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu	100	%	100	%	6	265.801.80	100	%	6	239.503.97	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR
			4	01	16	07	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun	3	jenis	3	Jenis	191.655.806	3	Jenis		167.174.276			
			4	01	16	09	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun	Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan Yang Disusun	3	jenis	3	Jenis	74.146.000	3	Jenis		72.329.700			
			4	01	24		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	persentase jumlah kerjasama antar daerah	87	%	87	%	295.834.050	87	%		268.837.368	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			4	01	24	01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan pemerintah daerah lain/lembaga/instansi lain	3 jenis	2 Kegiatan	93.857.100	2 Kegiatan	88.669.918		
			4	01	24	05	Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	3 kegiatan	2 kegiatan	201.976.950	2 kegiatan	180.167.450		
			4	01	31		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH	persentase lembaga yang memperoleh fasilitasi dan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas otonomi daerah	60 %	70 %	741.662.144	70 %	684.076.993	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR
			4	01	31	01	Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas otonomi daerah	4 kali	6 kegiatan	232.741.144	6 kegiatan	226.937.073		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			4	01	31	02	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan	3 kecamatan	3 kegiatan	208.785.200	3 kegiatan	189.046.020		
			4	01	31	03	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah	Jumlah pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan	798 Orang	3 kegiatan	300.135.800	3 kegiatan	268.093.900		
			4	01	37		PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)	Penyusunan LKjIP Kota Blitar Tepat Waktu	B	Tepat Waktu	103.168.050	Tepat Waktu	99.282.780	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR
			4	01	37	02	Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur	Jumlah partisipasi dalam gelar budaya kerja tingkat Provinsi	20 SKPD	1 Kali	103.168.050	1 Kali	99.282.780		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Target	Rp.	Target	Rp.			
			4	01	38	PROGRAM PENATAAN KETATALAKSAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah SKPD yang melaksanakan standar pelayanan	10	OPD	15	OPD	313.477.600	303.796.546	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR	
			4	01	38	01	Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan	Jumlah SKPD yang telah melakukan review SOP	100	%	75	OPD	260.598.100	250.919.046		
							Jumlah SKPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan			75	OPD	20			OPD	
							Persentase hasil survey IKM OPD yang berpredikat baik			85	%	80			%	
			4	01	38	02	Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO	Jumlah SKPD yang difasilitasi pendampingan sertifikasi ISO	1	SKPD	1	OPD	52.879.500	52.877.500		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									Target	Rp.	Target	Rp.				
		2. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	4	01	19	PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN	Jumlah rumusan kebijakan / rekomendasi di bidang perekonomian	90 %	4	kebijakan	414.142.150	4	kebijakan	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR	
			4	01	19	04	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi	Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID	-	5	Kali	159.355.416	2	Kali	80.800.196	
						Jumlah pelaksanaan Moneyv harga kebutuhan pokok(bulan)	-	12	Bulan	12	Bulan					
						Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (SEM 1 DAN 2)	-	2	Jenis	2	Jenis					

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			4	01	19	01	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah	Jumlah rapat koordinasi Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah	N/A	5 Kali	80.225.150	5 Kali	68.065.500		
			4	01	19	02	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan	Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah	N/A	7 Kali	80.907.000	6 Kali	67.101.231		
							Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak			4 Kali		4 Kali			
							Jumlah laporan hasil kegiatan			1 laporan		1 laporan			

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
									Target	Rp.	Target	Rp.						
			4	01	19	03	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD	Jumlah Kegiatan pembinaan Manajemen dan Teknis BUMD	2	Doku men	2	Kali	209.616.500	2	Kali	104.594.639		
								Jumlah Dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD			2	buah		1	buah			
			4	01	19	05	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitas Pengembangan TTG	N/A		3	kali	43.393.500	1	kali	8.169.753		
			4	01	23		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat	30	%	45	%	180.100.000	75	%	175.252.500	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										Target	Rp.	Target	Rp.				
			4	01	23	Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin/Rastra	Jumlah rumusan kebijakan di bidang raskin (dokumen Perwali, SK, Petunjuk Teknis, dan Pelaporan program raskin yang tersusun)	2	kegiatan	5	Dokumen	110.000.000	5	Dokumen	105.220.500		
			4	01	23	Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan	Jumlah buku profil bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang tersusun	0	Buku	1	Buku	70.100.000	1	Buku	70.032.000		
			4	01	24	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelayanan administrasi di Bidang kesejahteraan rakyat	15	%	100	%	3.400.000.000	99	%	3.219.390.366	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Target	Rp.	Target	Rp.			
			4	01	24	Fasilitasi koordinasi dan konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan	jumlah rapat - rapat koordinasi penyusunan kebijakan urusan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan	- Kali	25 Kali	3.350.000.000	24 Kali	3.192.003.700		
			4	01	24	Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial	Jumlah proposal yang di verifikasi	- Organisasi/ Lembaga	20 Proposal	50.000.000	19 Proposal	27.386.666		
			4	01	36	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Persentase penyerapan anggaran DBHCHT Kota Blitar	N/A	85 %	243.014.300	55 %	236.341.943	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Target	Rp.	Target	Rp.		
			4	03	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai	1 Kali	300 Orang	133.000.000	300 Orang	128.534.750		
			4	04	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai	Jumlah OPD pelaksana kegiatan dana Cukai yang dievaluasi	4 Jenis	10 OPD	110.014.300	16 OPD	107.807.193		
		3. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	4	40	PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan	-	9 kebijakan	124.517.200	7 kebijakan	72.662.000	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAN	KOTA BLITAR
			4	01	Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah pedoman dan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	1 Pedoman	1 Pedoman	55.916.300	1 Pedoman	33.803.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Target	Rp.	Target	Rp.		
			4	02	Pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	1 kali	78 Orang	29.092.200	78 Orang	15.375.000		
			4	05	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah kebijakan hasil rapat koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan	-	10 Kebijakan	39.508.700	9 Kebijakan	23.484.000		
			4	42	PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase OPD yang tertib Administrasi pembangunan	40 %	50 %	417.563.100	50 %	275.418.040	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGAD AAN	KOTA BLITAR
			4	03	Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen	4 Kegiatan	361.068.300	4 Kegiatan	257.518.040		
			4	04	Pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumentasi proses pembangunan di Kota Blitar		1 Dokumen	56.494.800	1 Dokumen	17.900.000		
			4	01									

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.			
		4. Nilai SAKIP Setda minimal B	4	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	100 %	100 %	74.932.700	60.902.500	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	KOTA BLITAR		
			4	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	47.671.300	37.685.000			
			4	01	06	5	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	27.261.400	23.217.500			
	3. Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	4	01	43	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Persentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-Procurement	96,69 %	90 %	892.107.700	827.888.255	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	KOTA BLITAR		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			4	01	43	01	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah berhasil	117 Paket	95 Paket	552.412.600	108 Paket	512.980.855		
			4	01	43	02	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis			286.040.100	0	265.432.400		
							- Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	250 Orang	70 Orang			50 Orang			
							- Bimbingan Teknis Kelompok Kerja	1 Forum	30 Orang			30 Orang			
							- Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan Kapasitas	32 Orang	30 Orang			30 Orang			

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			4	01	43	03	Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	95 Paket	95 Paket	53.655.000	108 Paket	49.475.000		
	4. Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta kehumasan dan keprotokolan	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	4	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	100 %	85 %	6.311.347.886	85 %	5.870.453.416	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR
			4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yg terbayar	4 rekening	4 rekening	1.158.000.000	4 rekening	874.283.425		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi	45 jenis	49 jenis	49.572.100	49 jenis	49.572.100		
			4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	49 jenis	2 jenis	95.628.200	2 jenis	95.628.200		
			4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	36 jenis	6 jenis	136.986.900	29 jenis	134.166.550		
			4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Cindera mata	3 Jenis	3 Jenis	136.600.000	3 Jenis	135.790.000		
			4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	7 Jenis	4 Jenis	120.842.486	4 Jenis	118.978.900		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun	2 jenis	2 jenis	49.920.000	2 jenis	49.920.000		
			4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	19 Kegiatan	1.367.213.800	18 Kegiatan	1.279.988.400		
			4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana	3 Kali	190 Kali	1.899.375.000	190 Kali	1.896.761.517		
			4	01	01	19	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jasa kerja/tenaga pengemudi	40 Orang	48 orang	1.297.209.400	48 orang	1.235.364.324		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									Target	Rp.	Target	Rp.		
		2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	4	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	80 %	4.300.111.200	76 %	3.984.947.304	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR
			4	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Jenis	5 Jenis	335.185.600	5 Jenis	280.709.100		
			4	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Unit	6 Jenis	244.988.800	6 Jenis	233.540.117		
			4	01	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	3 Jenis	3 Jenis	1.015.397.600	3 Jenis	921.181.399		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									Target	Rp.	Target	Rp.		
			4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 Jenis	5 Jenis	1.761.731.000	5 Jenis	1.705.894.296	
			4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	7 Jenis	17 Unit	709.930.000	17 Unit	628.110.392	
			4	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4 Jenis	2 Jenis	159.950.000	2 Jenis	142.615.000	
			4	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 Jenis	4 Jenis	72.928.200	4 Jenis	72.897.000	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									Target	Rp.	Target	Rp.		
			4	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus	1:1	100 %	40.161.000	100 %	40.161.000	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR
			4	01	03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan perlengkapannya yang terpenuhi	5 Jenis	5 jenis	40.161.000	5 jenis	40.161.000		
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	4	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	100 %	100 %	66.651.400	100 %	57.194.850	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR
			4	01	06 08	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan	8 Jenis	4 Jenis	66.651.400	4 Jenis	57.194.850		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Target	Rp.	Target	Rp.			
		4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) administrasi kerumah tanggaan	4	01	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terciptanya peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah	1:1	100 %	5.792.185.900	100 %	5.447.302.385	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR
				01	16	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH	2 Jenis	25 Jenis	5.792.185.900	2 Jenis		
		5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	4	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	100 %	100 %	105.325.000	100 %	104.242.950	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR
				01	07	11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 event	5 event	75.000.000	5 even		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
									Target	Rp.	Target	Rp.						
			4	01	07	12	Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	Terselenggaranya penyebarluasan informasi SKPD	1	Jenis	4	publikasi	30.325.000	4	publikasi	30.000.000		
			4	01	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Persentase keterisian data pendukung perencanaan pembangunan	91	%	80	%	197.000.000	91	%	195.631.410	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR
			4	01	15	07	Pendokumentasian Proses Pembangunan Daerah	Jumlah dokumentasi kegiatan yang dapat difasilitasi:	8	jenis			197.000.000			195.631.410		
							Foto				3630	lembar		3330	lembar			
							Shooting				3	kali		1	kali			

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.		
					Spanduk		76 buah		77 buah			
					Joglo		17 unit		18 unit			
					baliho		17 buah		17 buah			
					mini banner		40 buah		40 buah			
					umbul-umbul		40 buah		40 buah			
					x banner		4 buah		4 buah			

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Target	Rp.	Target	Rp.				
			4	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Persentase pemberitaan positif di media massa kegiatan pembangunan di Kota Bitar	80 %	80 %	95.000.000	79 %	94.999.302	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR	
			4	01	15	03	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	Jumlah pesertabimtek kehumasan	4 jenis	50 Orang	95.000.000	50 Orang	94.999.302		
			4	01	18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Persentase pemberitaan positif di media massa kegiatan pembangunan di Kota Blitar	100 %	80 %	1.588.000.000	79 %	1.571.189.000	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR	
			4	01	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah jumpa pers dan publikasi yang dapat difasilitasi:	5 jenis		1.588.000.000		1.571.189.000		
							Jumpa Pers		2 jumpa pres		2 jumpa pres				

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
									Target	Rp.	Target	Rp.					
						Media Radio		500	siar		625	siar					
						Media Televisi		73	siar		69	siar					
						Media Cetak		534	terbit		542	terbit					
						Media online		6	berita online		6	Berita online					
			4	01	36	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Persentase kegiatan yang bersumber DBHCHT yang dipublikasikan	80	%	100	%	200.000.000	100	%	199.700.000	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
			4	01	36	01				Target	Rp.	Target	Rp.		
			4	01	36	01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Jumlah publikasi yang dapat difasilitasi:	6 jenis		200.000.000		199.700.000		
							Media Televisi			800 siar		800 siar			
							Radio			800 siar		800 siar			
							Media Cetak			99 terbit		98 terbit			
							Spanduk			11 unit		11 unit			
							Baliho			2 unit		2 unit			

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.			
			4	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	70 %	100 %	350.500.000	100 %	240.840.000	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR	
			4	01	07	11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah Kegiatan yang dapat difasilitasi dalam peringatan Hari Besar	5 jenis	3 even	350.500.000	2 even	240.840.000		
			4	01	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai standart keprotokolan	65 %	100 %	2.394.061.300	100 %	2.297.704.750	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR	
			4	01	16	12	Penataan Acara Kedinasan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan kedinasan yang difasilitasi sesuai standar keprotokolan	4 paket	6 kegiatan	2.394.061.300	6 even	2.297.704.750		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
									Target	Rp.	Target	Rp.					
			4	01	24	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai SOP keprotokolan	%	100	%	138.000.000	100	%	78.793.393	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR	
			4	01	24	06	Fasilitasi kunjungan kerja antar Pemerintah Daerah	Jumlah kunjungan tamu daerah yang difasilitasi	26	kali	30	Kunjungan	138.000.000	17	Kunjungan	78.793.393	
			4	01	32	06	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai standart keprotokolan	65	%	0	%	0			BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR
			4	01	32	03	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek keprotokolan	1	kali	0	Orang	0				

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Tabel 6.1.3

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
			4	01	02	03			11	02	01	03			01	03	Target
Meningkatnya kemakmuran tempat ibadah	Peningkatan peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah	Peningkatan tempat ibadah yang representatif	4	01	02	03	11	PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN	Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi pemeluknya	85	%	87	%	5.463.864.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR	
								Kriteria Representatif adalah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana standar yang harus dimiliki oleh tempat ibadah									
			4	01	02	03	11	02	Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan	jumlah kegiatan yang terealisasi	9	even	10	even			1.069.600.000
			4	01	02	03	11	01	Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an	Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina	10	Lomba	10	lomba			498.264.000
4	01	02	03	11	03	Fasilitasi Tempat Ibadah dan Pengajar Agama	Jumlah Tempat Ibadah yang terfasilitasi	9	Unit	10	Unit	3.896.000.000					

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
										Target	Rp.	Target	Rp.			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	4	01	02	02	06	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Pengajar Agama yang terfasilitasi	1757	Orang	1760	Orang	-	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	KOTA BLITAR
									Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan	100	%	100	%	1.564.333.000		
									Presentase kasus yang memperoleh Bantuan Hukum	100	%	100	%	-		
								Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	%	100	%	-			

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
								Target	Rp.			
			4 01 02 02 06 06	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	2	kajian	3	kajian	100.143.400	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	KOTA BLITAR
			4 01 02 02 06 14	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan di atasnya	10	perda	10	perda	101.960.500		
			4 01 02 02 06 16	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan di atasnya	60	perwali	60	perwali	81.763.700		
			4 01 02 02 06 18	Penyusunan Surat Keputusan Walikota	Jumlah Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan di atasnya	750	SK	750	SK	15.604.800		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp.		
			4 01 02 02 06 01	Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan	Jumlah Bantuan Hukum Kedinasan Yang terfasilitasi	3	Kali	3	kasus	546.662.700	
			4 01 02 02 06 08	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar	3	Jenis	2	Produk Hukum	181.999.800	
			4 01 02 02 06 13	Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	6	kali	500	orang	125.094.400	
			4 01 02 02 06 05	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	6	kali	600	orang	110.578.100	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Target	Rp.	Target	Rp.		
			4 01 02 02 06 04	Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	46.541.600	
			4 01 02 02 06 12	Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan	Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi	1	Kajian	1	Kajian	52.755.000	
			4 01 02 02 06 03	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan penyesuaian tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja	2	Kebijakan	2	Kebijakan	57.191.100	
			4 01 02 02 06 10	Penyusunan standar jabatan	Jumlah jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N	150	jabatan	300	jabatan	144.037.900	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Target	Rp.		
					Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N	150 jabatan	300 jabatan	-		
					Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahun ke-N	150 jabatan	300 jabatan	-		
	2. Meningkatkan tertib administrasi Pemerintahan	1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	4 01 02 01 05	PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	2.124.682.550	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR
					Persentase jumlah kader/ pengurus yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan	90 %	92 %	-		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Target	Rp.		
					Penyusunan LKjIP Kota Blitar tepat waktu	- tepat waktu	- tepat waktu			
					Persentase OPD yang melaksanakan Standar pelayanan	80 %	85 %			
			4 01 02 01 05 13	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang menyusun LKjIP tepat waktu	29 OPD	29 OPD	467.290.650		
			4 01 02 01 05 16	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	6 Jenis	6 Dokumen	233.774.100		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
												Target	Rp.			
			4	01	02	01	05	04	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi lain	4	kegiatan	2	kerjasama	264.109.700	
										Jumlah event asosiasi Pemerintah Kota yang diikuti	-	-	2	even	-	
			4	01	02	01	05	09	Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah	jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas Otonomi Daerah	4	koordinasi	6	koordinasi	165.787.000	
			4	01	02	01	05	11	Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah peserta pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan	3	kegiatan	129	orang	324.339.300	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Target	Rp.		
					Jumlah tingkatan lomba kelurahan yang difasilitasi	2 kegiatan	2	lomba	-	
					Jumlah lomba sinergitas kecamatan yang difasilitasi	- -	1	lomba	-	
					Jumlah kelurahan yang melaksanakan entry/updating data profil kelurahan	21 kelurahan	21	kelurahan		
			4 01 02 01 05 06	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah	Jumlah peserta dalam pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan	3 kegiatan	857 orang		489.050.100	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Target	Rp.		
					Jumlah partisipasi lomba BBGRM yang diikuti dalam berbagai tingkatan	3 kegiatan	2	lomba		
			4	Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan	Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP	28 OPD	29	OPD	180.331.700	
			01		Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan	24 OPD	24	OPD	-	
			05		Jumlah OPD yang Hasil survey IKM nya berpredikat baik	85 %	26	OPD	-	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
										Target	Rp.			
		2. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	4	01	02	03	07	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelayanan Administrasi di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	864.387.500	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR
			4	01	02	03	07	Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang keagamaan	Jumlah rumusan kebijakan urusan keagamaan (SK, Perwali, Laporan)	4 kali	4 rumusan kebijakan	105.000.000		
			4	01	02	03	07	Fasilitasi Koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan bantuan pelayanan sosial keagamaan	Jumlah proposal yang diverifikasi	20 proposal	20 proposal	43.000.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
											Target	Rp.					
			4	01	02	03	07	07	Fasilitasi Koordinasi dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan Sosial	Jumlah rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial (perwali, SK, Juknis, Laporan)	5	rumusan kebijakan	5	rumusan kebijakan	170.000.000		
			4	01	02	03	07	08	Penyusunan Kajian Bidang Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Kajian (updating data) Bidang Sosial Kemasyarakatan	1	Dokumen	2	Dokumen	85.000.000		
			4	01	02	03	07	04	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi	Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID	5	kali	5	koordinasi	135.597.000		
										Jumlah pelaksanaan monev harga kebutuhan pokok (bulanan)	12	bulan	12	monev	-		
										Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (semester 1 dan 2)	2	Jenis	2	laporan	-		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			4	01	02	03	07	06			Target	Rp.	Target	Rp.			
			4	01	02	03	07	06	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan, Pengembangan Koperasi, UMKM, Dan Sarana Perekonomian Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah	7	kali	7	Koordinasi	204.681.000		
										Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak	4	kali	4	publikasi	-		
										Jumlah laporan hasil kegiatan	1	Jenis	1	Laporan	-		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
			4	01	02	03	07			05	Target	Rp.					
			4	01	02	03	07	05	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD	Jumlah kegiatan pembinaan manajemen dan teknis BUMD	2	kegiatan	2	pembi naan	121.109.500		
										Jumlah dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD	2	buah	2	Lapora n	-		
			4	01	02	03	13		PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Persentase Penyerapan Anggaran DBHCHT Kota Blitar	85	%	87	%	445.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
			4	01	02	03	13			02	Target	Rp.					
			4	01	02	03	13	02	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai	300	Orang	200	Orang	333.000.000		
									Jumlah publikasi pada media massa:								
									Media Radio	900	siar	900	siar				
									Media Televisi	1800	siar	1800	siar				
									Media Cetak	89	terbit	89	terbit				
									Spanduk	9	unit	9	unit				
									Baliho	3	unit	3	unit				
			4	01	02	03	13	01	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai	Jumlah OPD pelaksana kegiatan dana Cukai yang dievaluasi	10	OPD	2	laporan	112.000.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
			4	01	02	06			10	Target	Rp.					
		3. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	4	01	02	06	10	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase OPD Kategori tertib administrasi pembangunan	50	%	60	%	428.105.600	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAA N	KOTA BLITAR
								Kriteria OPD Tertib Administrasi Pembangunan: 1. Melaksanakan entry RUP pada SiRUP sebelum Tahun Anggaran berjalan; 2. Menetapkan dan mengentry ke Sistem terkait Target Realisasi Kegiatan dan Anggaran; 3. Mengentry realisasi fisik kegiatan segera setelah BA PPHP ditandatangani; 4. Realisasi Anggaran sesuai dengan Target yang direncanakan						BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAA N	KOTA BLITAR	
			4	01	02	06	10	04	Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	4	Doku men	4	Doku men	356.205.500	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
											Target	Rp.					
		4. Nilai SAKIP Setda minimal B	4	01	02	06	10	03	penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah	Jumlah pedoman dan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	1	Jenis	1	pedoman	33.385.600		
			4	01	02	06	10	01	fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah kebijakan hasil rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan	10	Kebijakan	10	Kebijakan	38.514.500		
			4	01	02	06	03		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100	%	100	%	149.037.500	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAA N	KOTA BLITAR
			4	01	02	06	03	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	49.346.700		
			4	01	02	06	03	03	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	6	Dokumen	6	Dokumen	99.690.800		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
			4	01	02	06	12			Target	Rp.	Target	Rp.				
	3. Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	4	01	02	06	12	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Persentase keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	96	%	97	%	1.661.367.575	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	KOTA BLITAR	
			4	01	02	06	12	01	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui Lelang/Seleksi yang telah berhasil dilaksanakan	95	Paket Lelang / Seleksi	96	Paket Lelang / Seleksi			924.438.775
			4	01	02	06	12	02	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	70	Orang	70	Orang			684.392.800
								Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis Kelompok Kerja	30	Orang	30	Orang					

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
												Target	Rp.			
									Jumlah Personil yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja	30	Orang	30	Orang			
			4	01	02	06	12	03	Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	95	dokumen	96	dokumen	52.536.000		
	4. Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat,	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan	4	01	02	04	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100	%	100	%	9.778.772.195	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE							PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			4	01	02	04	01	02	05			06	07	Target	Rp.			
	arsip, administrasi keuangan, kerumahan, sarana dan prasarana serta keprotokolan	surat menyurat dan arsip	4	01	02	04	01	02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	4	rek	4	rek	1.068.000.000		
			4	0	0	0	0	05	05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	49	jenis	49	macam	61.103.800		
			4	01	02	04	01	06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	41	jenis	41	cetakan	100.890.100		
											Jumlah lembar penggandaan	0	-	60000	lembar			
			4	01	02	04	01	07	07	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	29	jenis	29	komponen	99.818.895		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp.		
			4 01 02 04 01 08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3	macam	3	macam	120.210.000	
			4 01 02 04 01 09	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	40	jenis	40	macam	84.354.580	
			4 01 02 04 01 10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2	jenis	2	bahan bacaan	49.920.000	
			4 01 02 04 01 11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dos/kotak mamin yang tersedia	43	paket	10000	dos/kotak	1.126.043.000	
					Jumlah porsi mamin yang tersedia	0	0	25000	porsi		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Target	Rp.		
		2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	190 kali	190 rakor	1.223.227.400		
			01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia	48 orang	48 orang	1.394.720.820		
			02	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun	-	2 unit	300.836.000		
			01	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi	-	2 unit	1.457.392.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Target	Rp.		
			4 01 02 04 01 20	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	5 jenis	5 maca m	51.692.900		
			4 01 02 04 01 21	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi	5 jenis	8 maca m	108.502.200		
			4 0 0 0 0 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah jenis pemeliharaan rumah dinas	3 jenis	3 unit	845.910.000		
			4 0 0 0 0 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 gedun g	3 unit	723.034.000		
			4 01 02 04 01 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	17 unit	17 unit	687.445.700		
			4 01 02 04 01 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	4 maca m	200.599.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp.		
			4 01 02 04 01 27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	3	jenis	3	macam	75.071.800	
			4 01 02 04 01 30	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	-	-	-	-	-	
			4 01 02 04 02 02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100	%	100	%	114.836.000	BAGIAN UMUM
			4 01 02 04 02 04	Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yg diikuti	5	even	5	even	75.000.000	
			4 01 02 04 02 05	Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan PD	6	bagian	0	-		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
											Target	Rp.	Target			Rp.	
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) penatausahaan keuangan	4	01	02	04	02	07	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	5	jenis	12	orang	39.836.000	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR
		4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) administrasi kerumah tanggaan	4	01	02	04	08		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	100	%	100	%	4.822.877.000	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR
			4	01	02	04	08	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah yang terfasilitasi	25	Jenis	25	macam	4.822.877.000		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			4	01	02	05			09	Target	Rp.				
		5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	4	01	02	05	09	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	Persentase Pemberitaan positif kegiatan Pembangunan di Media Massa	73 %		75 %	4.981.530.200	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR
									Persentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	80 %		80 %			
			4	01	02	05	09	06	Pendokumentasian kegiatan pimpinan daerah	80 %		83 %	188.719.900		
									jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan daerah:						
									Foto	2500 lembar		3000 lembar			
									Video	3 film		3 film			
									Spanduk	70 buah		70 buah			
									Joglo	15 unit		15 unit			

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp.		
			4	Penyebarluasan informasi kegiatan pimpinan daerah	Baliho	18	unit	18	unit	2.042.101.000	
			01		mini Banner	40	buah	40	buah		
			02		Umbul-umbul	40	buah	40	buah		
			05		Jumlah jumpa pers dan publikasi kegiatan pimpinan daerah pada media massa:	-	-	-	-		
			09		Jumpa Pers	2	kegiatan	2	kegiatan		
			08		Media Radio	539	siar	539	siar		
					Media Televisi	52	siar	52	siar		
					Media Cetak	315	terbit	315	terbit		
					Jumlah Naskah Sambutan pimpinan Daerah yang disusun	325	Naskah	330	Naskah		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2018		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Target	Rp.		
					Jumlah Rakor Bakohumas	- -	2	rakor		
					Fasilitasi sinkronisasi/publikasi program KDH	- -	7	fasilitasi		
			4 01 02 05 09 04	Penataan acara kedinasan pemerintah daerah	Jumlah kegiatan kedinasan yang difasilitasi sesuai standar keprotokolan	5 kegiatan	5	even	2.527.709.300	
			4 01 02 05 09 02	Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja antar pemerintah daerah	Jumlah penerimaan tamu daerah yang terfasilitasi	30 penerimaan	30	penerimaan	98.000.000	
			4 01 02 05 09 01	Fasilitasi Pelaksanaan Even Daerah dan Hari Besar Nasional	Jumlah Kegiatan even daerah yang dapat difasilitasi	1 kegiatan	1	even	125.000.000	

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Tabel 6.1.4
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
										2019		2020		2021			Kondisi	%	Rp.			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target						Rp.		
Meningkatkan kemakmuran tempat ibadah	Meningkatnya peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah	Peningkatan tempat ibadah yang representatif	4	01	02	03	11	PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN	Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi pemeluknya	87	%	90	%	5.737.057.200	93	%	6.023.910.060	95	%	6.325.105.563	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR
								Kriteria Representatif adalah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana standar yang harus dimiliki oleh tempat ibadah														
			4	01	02	03	11	01	Fasilitasi pelayanan sosial keagamaan	Jumlah Tempat Ibadah yang terfasilitasi	35	Unit	10	Unit	10	Unit	6.023.910.060	10	Unit	6.325.105.563		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2019						KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.			
					Jumlah Guru Ngaji dan Guru Minggu yang terfasilitasi	1.715	Orang	1.765	Orang	1.770	Orang	1.770	Orang		
					Jumlah even keagamaan / pengajian yang terfasilitasi	10	even	10	even	10	even	10	even		
					Jumlah Cabang Lomba MTQ yang diikuti	6	Cabang Lomba	6	Cabang Lomba	6	Cabang Lomba	6	Cabang Lomba		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		2019			2020			2021			KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp.				
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah an daerah	presentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan	4	01	02	02	06	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (kaidah penulisan, isi dan kewenangan)	100	%	100	%	1.747.807.950	100	%	1.835.198.348	100	%	1.926.958.265	100	%	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI I	KOTA BLITAR
			4	01	02	02	06			01	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan di atasnya	28	raperda	10	raperda	314.446.020	10	raperda	330.168.321	10	raperda		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN							KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
							2019		2020		2021									
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.								
					Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan di atasnya	187	perwali	60	perwali	60	perwali	60	perwali	367	perwali					
					Jumlah Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan di atasnya	750	SK	750	SK	650	SK	600	SK	3.813	SK					
			4	01	02	06	02	Fasilitasi Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Kedinasan	Jumlah Fasilitasi Kasus Yang Mendapatkan Bantuan Hukum Kedinasan	3	Kasus	3	Kasus	810.603.255	3	Kasus	893.690.089	3	Kasus	
					Jumlah Peserta Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	500	orang	600	orang	600	orang	600	orang	600	orang					
			4	01	02	06	03	Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	600	orang	600	orang	307.206.795	600	orang	338.695.491	600	orang	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2019						KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2019		2020		2021					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.				
					Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar	2	Produk Hukum	2	Produk Hukum		2	Produk Hukum				
			04	fasilitasi evaluasi roadmap reformasi birokrasi	Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	48.868.680	1	Dokumen	53.877.720	1	Dokumen	
			05	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan penyalarsan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja	1	Dokumen	2	kebijakan	115.443.405	2	kebijakan	121.215.575	2	kebijakan	
			06	updating standar jabatan	Jumlah jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N	1.400	jabatan	1.400	jabatan	151.239.795	1.400	jabatan	158.801.785	1.400	jabatan	
			06													
			06													
			02													
			01													
			4													

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
											2019		2020		2021								
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.							
								Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N	300	jabatan	1.878	jabatan	0	0	50	jabatan	0	1.878	jabatan				
								Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahun ke-N	300	jabatan	1.400	jabatan	0	0	1.400	jabatan	0	1.958	jabatan				
	2. Meningkatkan tertib administrasi Pemerintahan	1. presentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	4	01	02	01	05	PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	100	%	100	%	2.214.941.768	100	%	2.325.688.856	100	%	2.623.973.299	%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR	
			4	01	02	01	05	01	Penyusunan Dokumen Sistem	24	OPD	24	OPD	579.287.048	27	OPD	608.251.400	27	OPD	638.663.970	27	OPD	
								Penyelenggaraan Pemerintah Daerah															
								Jumlah OPD dengan predikat nilai pelaporan kinerja minimal memuaskan	24	OPD	24	OPD	579.287.048	27	OPD	608.251.400	27	OPD	638.663.970	27	OPD		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN							KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.			
					Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP	29	OPD	29	OPD	29	OPD	29	OPD		
					Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan	24	OPD	24	OPD	24	OPD	24	OPD		
					Jumlah OPD yang hasil survey SKM nya berpredikat baik	26	OPD	27	OPD	28	OPD	28	OPD		
			4		Jumlah jenis Dokumen Pelaporan yang disusun	6	Dokumen	4	Dokumen	6	Dokumen	4	Dokumen		
			01		jumlah jenis koordinasi peningkatan kualitas Otonomi Daerah	6	koordinasi	6	koordinasi	8	koordinasi	6	koordinasi		
			02												
			05												
			01												
			02												
			01	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah											
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												
			01												
			02												
			05												

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN							KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							2019		2020		2021								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.							
					Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga / Instansi lain	2	kerjasama	4	kerjasama		6	kerjasama	6	kerjasama					
					Jumlah event asosiasi Pemerintah Kota yang diikuti	2	even	2	even		2	even	2	even					
			4	01	02	01	05	03	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah peserta rakor kewilayahan	129	orang	129	orang	854.058.870	129	orang		
					Jumlah tingkatan lomba kelurahan yang difasilitasi	2	lomba	2	lomba		2	lomba	2	lomba	896.761.814	2	lomba		
					Jumlah lomba sinergitas kecamatan yang difasilitasi	1	lomba	1	lomba		1	lomba	1	lomba	941.599.904	1	lomba		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2019						KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI							
							2019		2020		2021											
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.										
					Jumlah kelurahan yang melaksanakan entry/updating data profil kelurahan	21	kelurahan	21	kelurahan	21	kelurahan	21	kelurahan									
					Jumlah peserta peningkatan peran lembaga kemasyarakatan	857	orang	857	orang	857	orang	857	orang									
					Jumlah partisipasi lomba BBGRM yang diikuti dalam berbagai tingkatan	2	lomba	1	lomba	1	lomba	1	lomba									
		2. presentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	4	01	02	03	07	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	9	rumusan kebijakan	962.206.875	9	rumusan kebijakan	1.010.317.219	9	rumusan kebijakan	1.060.833.080	54	rumusan kebijakan	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR
					Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian	5	rumusan kebijakan	5	rumusan kebijakan	5	rumusan kebijakan		5	rumusan kebijakan		30	rumusan kebijakan					

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
										2019		2020		2021									
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.								
			01	07	03	02	Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang keagamaan	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang keagamaan	4	draf rumusan	4	draf rumusan	210.000.000	4	draf rumusan	220.500.000	4	draf rumusan	231.525.000	4	draf rumusan		
			01	07	03	02	Fasilitasi Koordinasi dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	5	draf rumusan	5	draf rumusan	267.750.000	5	draf rumusan	281.137.500	5	draf rumusan	295.194.375	5	draf rumusan		
			01	07	03	03	Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang perekonomian	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang perekonomian	5	draf rumusan	5	draf rumusan	484.456.875	5	draf rumusan	508.679.719	5	draf rumusan	534.113.705	5	draf rumusan		
			01	02	03	13	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Persentase Penyerapan Anggaran DBHCHT Kota Blitar	87	%	90	%	465.165.015	93	%	488.423.266	95	%	512.844.429	95	%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2019						KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI								
							2019		2020		2021												
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.											
			4	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai	200	Orang	300	Orang	349.650.000	300	Orang	367.132.500	300	Orang	385.489.125							
		01	Jumlah publikasi pada media massa:		Media Radio	900	siar	900	siar	0	89	9	3	0	siar	siar	terbit	unit	unit	unit	even		
		02			Media Televisi	1.800	siar	1.800	siar	0	89	9	3	0	siar	siar	terbit	unit	unit	unit	unit	even	
		03			Media Cetak	89	terbit	89	terbit	9	9	9	3	0	terbit	terbit	unit	unit	unit	unit	unit	even	
		13			Spanduk	9	unit	9	unit	9	9	9	3	0	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	even	
		02			Baliho	3	unit	3	unit	3	3	3	0	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	even
		02			Jumlah publikasi pada Event Daerah	0	even	0	even	4	4	4	4	0	even	even	unit	unit	unit	unit	unit	unit	even

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2019						KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
											2019		2020		2021										
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.									
			4	01	02	03	13	01	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai	Jumlah pelaporan DBHCHT tepat waktu	2	dokumen	2	dokumen	115.515.015	10	OPD	121.290.766	10	OPD	127.355.304				
		3. presentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	4	01	02	06	10		PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase OPD Kategori tertib administrasi pembangunan	60	%	70	%	400.000.000	80	%	420.000.000	90	%	441.000.000	90	%	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	KOTA BLITAR

Kriteria OPD Tertib Administrasi Pembangunan: 1. Melaksanakan entry RUP pada SiRUP sebelum Tahun Anggaran berjalan; 2. Menetapkan dan mengentry ke Sistem terkait Target Realisasi Kegiatan dan Anggaran; 3. Mengentry realisasi fisik kegiatan segera setelah BA PPHP ditandatangani; 4. Realisasi Anggaran sesuai dengan Target yang direncanakan

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN							KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.			
			4 01 02 06 10 01	penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah	jumlah pedoman yang tersusun	1 Pedoman	1 Pedoman 100.000.000	1 Pedoman 105.000.000	1 Pedoman 110.250.000	1 Pedoman	1 Pedoman				
					Jumlah draf rumusan kebijakan pembangunanan daerah urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perumahan dan permukiman, LH, Perhubungan, Kehutanan, ESDM serta bidang program administrasi pembangunan.	5 draf rumusan kebijakan	5 draf rumusan kebijakan	5 draf rumusan kebijakan	5 draf rumusan kebijakan	25 draf rumusan kebijakan					

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2019						KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.			
			4 01 02 06 10 02	pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen	4 Dokumen 300.000.000	4 Dokumen	4 Dokumen 315.000.000	4 Dokumen	4 Dokumen 330.750.000	4 Dokumen			
					Jumlah draf rumusan kebijakan pembangunanan daerah urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan .	10 draf rumusan kebijakan	10 draf rumusan kebijakan	10 draf rumusan kebijakan	10 draf rumusan kebijakan	10 draf rumusan kebijakan	45 draf rumusan kebijakan	45 draf rumusan kebijakan			
					jumlah jenis dokumen yang pelaporan yang disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2019						KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												2019		2020		2021				
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.			
		4. Nilai SAKIP Setda minimal B	4	01	02	06	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	presentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100 %	100 %	104.675.340	100 %	109.909.107	100 %	115.404.562	100 %	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	KOTA BLITAR	
			4	01	02	06	03	01	Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	6 Dokumen	8 Dokumen	104.675.340	8 Dokumen	109.909.107	8 Dokumen	115.404.562	8 Dokumen		
		3. Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	4	01	02	06	12	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	presentase keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	97 %	98 %	1.744.435.954	99 %	1.831.657.751	100 %	1.923.240.639	100 %	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	KOTA BLITAR	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2019						KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.			
			01	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui Lelang/Seleksi yang telah berhasil dilaksanakan	96	Paket Lelang/ Seleksi	94	Paket Lelang/ Seleksi	96	Paket Lelang/ Seleksi	98	Paket Lelang/ Seleksi		
			02	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	jumlah fasilitasi dokumen pengadaan barang/jasa	96	Dokumen	94	Dokumen	96	Dokumen	98	Dokumen		
			01	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	70	Orang	70	Orang	70	Orang	70	Orang		
			02	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan	0	Orang	70	Orang	70	Orang	70	Orang		
			01	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	UKPBJ dan Pokja	0	Orang	26	Orang	26	Orang	26	Orang		
			02	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	PA /KPA	0	Orang	68	Orang	68	Orang	68	Orang		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2019						KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
											2019		2020		2021					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.				
								PPK	0	Orang	120	Orang	120	Orang	120	Orang				
								Jumlah Personil yang mengikuti Forum IPFE, JFT dan Seminar dll)	0	Orang	12	Orang	12	Orang	12	Orang				
	4. Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta keprotokolannya	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	4	01	02	04	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	persentase partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100	%	100	%	100	%	190.818.275	100	%	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR
							01	Pengelolaan Administrasi Dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5	even	5	even	5	even	190.818.275	5	even		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2019						KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
										2019		2020		2021						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.					
							Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	12	Orang	12	Orang	12	Orang	12	Orang					
			4	01	02	04	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	100	%	100	%	10.378.998.572	100	%	10.897.948.501	11.442.845.926	100	%	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR
			4	01	02	04	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	49	macam	45	macam	1.531.075.245	45	macam	1.607.629.007	0	0	48	macam	
							Jumlah barang cetakan yg tersedia	41	cetakan	28	cetakan		28	cetakan		0	0	28	cetakan	
							Jumlah lembar penggandaan	60.000	lembar	60.000	lembar		60.000	lembar		0	0	60.000	lembar	

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2019						KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.			
					Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia	2	bahan bacaan	2	bahan bacaan	0	bahan bacaan	2	bahan bacaan		
					jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	10.000	dos/kotak	1.750	dos/kotak	0	dos/kotak	18.000	dos/kotak		
					Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia porsi	25.000	porsi	25.000	porsi		porsi	125.000	porsi		
					Jumlah jenis cinderamata khas daerah yang tersedia	3	macam	3	macam		macam	3	macam		
			4	05	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	1	dokumen	1	dokumen	15.750.000	dokumen	1	dokumen		
			01									17.364.375			
			02												
			04												
			01												

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											2019		2020		2021			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.		
		2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	4	01	02	04	01	04	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran		5.987.789.929		6.287.179.425		6.601.538.396			
								Jumlah rekening yang terbayarkan	4 rekening	4 rekening	4 rekening	4 rekening	4 rekening	4 rekening	4 rekening			
								Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	64 kendaraan	65 kendaraan	65 kendaraan	65 kendaraan	65 kendaraan	65 kendaraan	65 kendaraan			
								Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	29 komponen	29 komponen	29 komponen	29 komponen	29 komponen	29 komponen	29 komponen			
								Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	40 macam	40 macam	40 macam	40 macam	40 macam	40 macam	40 macam			

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN							KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.			
					jumlah bangunan kantor yang terbangun	2 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	2 unit	0 unit		1 unit		1 unit		4 unit		
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	12 macam	12 macam		12 macam		12 macam		12 macam		
					Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	8 macam	5 macam		5 6		8 macam		30 macam		
					Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	3 unit	3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	17 unit	17 unit		17 unit		17 unit		17 unit		

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2019						KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
												2019		2020		2021									
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.								
									Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	4	macam	3	macam	3	macam	3	macam								
									Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3	macam	3	macam	3	macam	3	macam								
									Jumlah bangunan kantor yang terehab		unit	1	unit	1	unit	0	unit								
									Jumlah rumah dinas yang terpelihara	3	unit	3	unit	3	unit	3	unit								
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) penatausahaan keuangan	4	01	02	04	01	06	Penyusunan Laporan Keuangan	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	54.004.827	4	dokumen					
		4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) administrasi kerumah tanggaan	4	01	02	04	01	02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	190	rapat koordinasi	190	rapat koordinasi	190	rapat koordinasi	190	rapat koordinasi	1.467.364.181	190	rapat koordinasi					

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
											2019		2020		2021								
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.							
			4	01	02	04	01	03	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	52	orang	56	orang	1.464.456.861	60	orang	1.537.679.704	64	orang	1.614.563.689	BAGIAN UMUM	KOTA BLITAR
			4	01	02	04	08		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	100	%	100	%	5.250.000.000	100	%	5.512.500.000	100	%	5.788.125.000		
			4	01	02	04	08	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah yang terfasilitasi	25	macam	25	macam	5.250.000.000	25	macam	5.512.500.000	25	macam	5.788.125.000		
		5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	4	01	02	05	09		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	presentase Pemberitaan positif kegiatan Pembangunan di Media Massa	75	%	78	%	5.230.606.710	80	%	5.492.137.046	80	%	5.766.743.898	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2019						KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.			
					presentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	80 %	75 %		78 %		78 %	78 %			
			4	01	02	05	09	02	fasilitasi kehumasan pimpinan dan pemerintah daerah	jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan daerah:			2.582.454,044		
					Foto	3.000 lembar	3.000 lembar		3.000 lembar		3.000 lembar	19.290 lembar			
					Video shooting	3 Video shooting	10 Video shooting		10 Video shooting		10 Video shooting	44 Video shooting			
					motion graphic	0	5		7		9	21			
					Spanduk	70 buah	70 buah		70 buah		70 buah	427 buah			
							2.342.361.945		2.459.480.042		2.582.454.044				

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN							KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.			
					Joglo	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	93 unit			
					Baliho	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	120 unit			
					mini Banner	40 buah	40 buah	40 buah	40 buah	40 buah	40 buah	226 buah			
					Umbul-umbul	40 buah	40 buah	40 buah	40 buah	40 buah	40 buah	200 buah			
					Jumlah jumpa pers dan publikasi kegiatan pimpinan daerah pada media massa										
					Jumpa Pers	2 Jumpa Pers	2 Jumpa Pers	2 Jumpa Pers	2 Jumpa Pers	2 Jumpa Pers	2 Jumpa Pers	12 Jumpa Pers			
					Media Radio	539 siar	539 siar	539 siar	539 siar	539 siar	539 siar	3.151 siar			
					Media Televisi	52 siar	52 siar	52 siar	52 siar	52 siar	52 siar	340 siar			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan penyelenggaraan bidang urusan suatu organisasi, perlu menetapkan indikator kinerja yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Adapun Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Blitar dapat dilihat pada **Tabel 7.1.1**, **Tabel 7.1.2**, dan **Tabel 7.1.3** sebagai berikut:

Tabel 7.1.1
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2016 – 2017

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)		TARGET 2017	REALISASI 2017
			2015	2016		
1	Presentase tempat ibadah aktif	Presentase tempat ibadah aktif	55%	62%	70%	75,38%
2	Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	1 : 86	1 : 86	1 : 85	1 : 87
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	C	B	B	BB
4	Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)	Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Tabel 7.1.2
 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar
 Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 Tahun 2018

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET 2018	REALISASI 2018
			2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase tempat ibadah aktif	Persentase tempat ibadah aktif	62%	75,38%	78%	73,76%
2	Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	1 : 86	1 : 87	1 : 84	1 : 74
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan	B	BB	BB	BB
4	Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar (Nilai LPPD)	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Tabel 7.1.3
 INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
 TAHUN 2019 – 2021

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2017)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD			KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN 2021
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Presentase tempat ibadah aktif	Persentase tempat ibadah aktif	75,38%	83%	92%	100%	100%
2	Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	1 : 87	1 : 83	1 : 82	1 : 80	1 : 80
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan	BB	BB	BB	A	A
4	Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar (Nilai LPPD)	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar 2016-2021 ini, disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang mana yang dalam penyusunannya mempertimbangkan dengan seksama hasil pelaksanaan evaluasi SAKIP, evaluasi pelaksanaan rencana strategis sampai dengan tahun 2017 dan adanya perubahan regulasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Blitar wajib menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 2016-2021 yang bersifat indikatif serta disusun yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar yang selanjutnya dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.


Dokumen ini juga berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Aparatur Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas menyusun, menetapkan dan mengkoordinasikan penerapan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian-bagian di lingkungan sekretariat daerah dalam menjabarkan visi dan misi walikota dan wakil walikota.

Dalam pelaksanaan Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 diperlukan kecermatan, kreatifitas, respon yang cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, kelenturan / fleksibilitas, dinamis dan berdaya guna serta yang tidak kalah penting adalah partisipasi dan komitmen seluruh Aparatur Sekretariat Kota Blitar sehingga program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, tercapai target yang telah ditentukan dan dapat memberikan jawaban / solusi bagi permasalahan Sekretariat Daerah.

Disamping itu dokumen review ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga hasil yang didapatkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan *good governance*, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan semangat **“RUKUN AGAWE SANTOSO”** dan **“ONE FOR ALL & ALL FOR ONE”**.

Blitar, Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH



Drs. RUDY WIJONARKO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601219 198702 1 003